

**PERAN PEMERINTAH LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN
PETANI CENGKEH DI DESA ADEAN KABUPATEN
BANGGAI LAUT SULAWESI TENGAH**

SKRIPSI

**Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

WAHYUNA H. MAIDA

NIM 2018020093

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA
2022**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH LOKAL DALAM
PEMBERDAYAAN PETANI CENGKEH DI DESA
ADEAN KABUPATEN BANGGAI LAUT SULAWESI
TENGAH**

WAHYUNA H. MAIDA
NIM 2018020093

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**

Dr. HENDRO WARDHONO, M.Si

PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN PETANI CENGKEH DI DESA ADEAN KABUPATEN BANGGAI LAUT SULAWESI TENGAH

Disusun Oleh :

WAHYUNA H. MAIDA
NIM 2018020093

**Telah Dipertahankan di depan Sidang Dewan Penguji
Pada Tanggal 16 Februari 2022 dan dinyatakan
Telah memenuhi syarat untuk diterima.**

Susunan Dewan Penguji,

Penguji I	: Dr. Hendro Wardhono, M.Si.
Penguji II	: Drs. Basuki Nugroho, M.Si.
Penguji III	: Widyawati S.Sos, M.Si.

**Surabaya, 16 Februari 2022
Universitas Dr. Soetomo
Fakultas Ilmu Administrasi
Dekan**

Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd
NIDN : 0718016601

PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah SKRIPSI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah SKRIPSI ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini di gugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 16 Februari 2022

Mahasiswa,

Wahyuna H. Maida

2018020093

Program Studi Ilmu

Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Dr. Soetomo

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum WR. WB, puji syukur kehadiran Allah Swt Karena dengan izinnyalah penulis bisa Menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Peran Pemerintah Lokal Dalam Pemberdayaan Petani Cengkeh Di Desa Adean Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah**”.

Skripsi ini di Buat Guna memenuhi salah satu syarat Untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Ilmu Administrasi Universitas DR. Soetomo Surabaya.

Penulis Menyadari bahwa di dalam penulisan Skripsi Ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak untuk itu, Tidak lupa pula penulis Ucapkan Terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Ibu Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. Rektor Universitas DR. Soetomo Surabaya
2. Ibu Prof. Sedarmayanti, M.Pd Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
3. Ibu Dra. Damayanti Sri Lestari, MM Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Administrasi.
4. Ibu Sri Roekminiati, S.Sos., M.Kp Kaprodi Ilmu Administrasi Negara
5. Bapak Dr. Hendro Wardhono M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyusun Skripsi ini Sehingga dapat diselesaikan.
6. Semua dosen pengampu pada Program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang sudah banyak memberikan ilmu

dan pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Dr. Soetomo Surabaya ini.

7. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan semangat dan bantuan dengan sepenuh hati dan mendoakan sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kakakku tersayang yang paling baik yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta mendoakan.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu saling memberikan semangat dan dukungan kepada satu sama lain.
10. Semua pihak yang terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan untuk itu penulis membutuhkan masukan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Skripsi ini bisa Bermanfaat untuk kita semua, Untuk itu tidak lupa pula Penulis mengucapkan terima kasih.

Surabaya 16 Februari 2022

Penulis

Wahyuna H. Maida

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah swt, karena dengan rahmat dan ridho nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi Ini dengan Tepat pada waktunya skripsi ini yang berjudul Peran Pemerintah Lokal Dalam pemberdayaan Petani cengkeh di Desa Adean Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah, penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk : (i) untuk mengetahui Bagaimana peran pemerintah lokal dalam pemberdayaan petani cengkeh di Desa Adean, (ii) untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peran pemerintah lokal dalam memberdayakan petani cengkeh di Desa Adean, (iii) untuk mengetahui rekomendasi kebijakan apakah yang dapat di rumuskan agar dapat meningkatkan kapasitas peran pemerintah lokal dalam memberdayakan petani cengkeh di Desa Adean.

Untuk itu sehubungan dengan penelitian ini maka penulis menggunakan teori pemberdayaan Masyarakat pertanian menurut Setiyo Yuli Handono (2020) Metode di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan fokus penelitiannya adalah : (i), peran pemerintah lokal dalam pemberdayaan petani cengkeh khususnya dalam upaya melakukan pemberdayaan melalui program –program pemerintah di lintas instansi/OPD, (ii) faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peran pemerintah lokal dalam pemberdayaan petani cengkeh, baik dalam lingkup internal maupun eksternal, (iii) rekomendasi kebijakan yang didasarkan atas telaah teoritik dari teori-teori Administrasi public yang relevan dan temuan-temuan penelitian.

Hal yang di peroleh adalah : (i) Pemerintah sudah menjalankan perannya dalam memberdayakan masyarakat petani cengkeh, dengan cara pembagian bibit cengkeh yang di lakukan oleh pemerintah, serta mengadakan pembinaan, pelatihan serta penyuluhan kepada petani cengkeh, (ii) petani di ajarkan cara membuat pupuk, cara pemupukan, pengendalian hama dan penyakit.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak terjadi kekurangan, untuk itu, kritik dan saran sangat di perlukan dengan tujuan untuk perbaikan skripsi ini.

Surabaya 16 Februari 2022
Penulis

Wahyuna H. Maida

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Konsep Peran Pemerintah.....	15
2.3. Desentralisasi Dan Pemerintah Daerah	19
2.4. Tugas Dan Fungsi Pemerintah daerah.....	21
2.5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	25

BAB. III METODE PENELITIAN	53
3.1. Jenis Penelitian.....	53
3.2. Fokus Penelitian.....	53
3.3. Informan Penelitian.....	54
3.4. Prosedur Pengumpulan Data.....	54
3.5. Lokasi Penelitian.....	55
3.6. Prosedur Analisis Data.....	56
BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	58
4.2. Struktur Organisasi Desa Adean Tahun 2017-2023.....	64
4.3. Peran Pemerintah Lokal Dalam Pemberdayaan Petani Cengkeh di Desa Adean	64
4.4. Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah Lokal dalam pemberdayaan petani cengkeh di desa Adean	75
BAB. V PENUTUP	82
5.1. Kesimpulan	82
5.2. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Luas Wilayah, jumlah desa/kelurahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banggai Laut	59
Tabel 4.2 Data kependudukan Kabupaten Banggai Laut Per Kecamatan.....	60
Table 4.3 Identitas Informan.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Analisis model interaktif.....	56
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Adean.....	64

ABSTRAK

Pokok dari pada permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Peran pemerintah lokal dalam memperdayakan petani cengkeh di Desa Adean kabupaten banggai laut sulawesi tengah? 1)Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung peran pemerintah lokal dalam Memperdayakan petani cengkeh di desa adean kabupaten banggai laut sulawesi tengah? 2)Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung peran pemerintah lokal dalam Memperdayakan petani cengkeh di desa adean kabupaten banggai laut sulawesi tengah? 3) Rekomendasi kebijakan apakah yang dapat di rumuskan agar dapat meningkatkan kapasitas peran pemerintah lokal dalam memperdayakan petani cengkeh di desa adean kabupaten banggai laut sulawesi tengah?

Jenis penelitian ini adalah Penelitian field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan prosedur analisis. Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu di Desa Adean Kabupaten Banggai Laut Sulawesi tengah. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah Wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prosedur analisis data dari penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah sudah menjalankan tugasnya untuk memberdayakan masyarakat dengan mengadakan pelatihan serta penyuluhan, pemerintah juga membagikan sejumlah bibit cengkeh kepada para petani, tidak hanya itu, petani juga di ajarkan cara membuat pupuk, cara pemupukan, pengendalian hama dan penyakit.

Adapun Saran yang di ajukan dalam rangka Penyelesaian permasalahan tersebut yaitu, pemerintah bisa lebih Terfokus untuk mengupayakan kesejahteraan petani cengkeh dengan cara membuat lagi berbagai strategi atau konsep pertanian secara Kukuh atau mantap karena semakin meningkatnya produktifitas dan kesejahteraan petani cengkeh maka perkembangan produksi cengkeh akan meningkat.

Kata Kunci : Pemberdayaan,Peran Pemerintah ,Petani Cengkeh .

ABSTRACT

The main problem of this research is how is the role of local government in empowering clove farmers in Adean Village, Banggai Laut Regency, Central Sulawesi? 1) What are the factors that hinder and support the role of local government in empowering clove farmers in Adean Village, Banggai Laut Regency, Central Sulawesi? 2) What are the factors that hinder and support the role of local government in empowering clove farmers in Adean Village, Banggai Laut Regency, Central Sulawesi? 3) What policy recommendations can be formulated in order to increase the capacity of the local government's role in empowering clove farmers in Adean Village, Banggai Laut Regency, Central Sulawesi? The type of this research is this research is a field research (field research) using a qualitative approach, namely research that is descriptive and uses analytical procedures. The location of this research is in Adean Village, Banggai Laut Regency, Central Sulawesi. Data collection methods used are interviews, observation, and documentation. The data analysis procedure of this research is data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the government has carried out its duties to empower the community by holding training and counseling, the government also distributes a number of clove seeds to farmers, not only that, farmers are also taught how to make fertilizer, how to fertilize, control pests and diseases. The suggestions put forward in the context of solving these problems, namely, the government can be more focused on seeking the welfare of clove farmers by making again various strategies or agricultural concepts in a firm or steady manner because the productivity and welfare of clove farmers will increase, the development of clove production will increase.

Keywords: *Empowerment, Role of Government, Clove Farmers.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, hal ini juga Memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk mendapatkan pendapatan dari kelimpahan kekayaan hayati itu sendiri. Kemajuan dunia menuju arah globalisasi dalam segala bidang kehidupan yang mencakup beberapa bidang termasuk pemerintahan, inovasi, pertanian, sosial dan budaya, telah membawa banyak efek, baik konsekuensi positif maupun negatif, globalisasi dapat memacu kemajuan yang sangat cepat pada peningkatan kualitas perkembangan negara. Selain itu, Indonesia juga terkenal dengan tanahnya yang subur sehingga di mana pun Anda menanam tanaman, dapat tumbuh dengan subur.

Pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Ini menyiratkan bahwa pertanian adalah bidang utama yang mencatat hampir setengah dari perekonomian. pertanian juga memiliki peran nyata dalam perdagangan asing melalui pengiriman Dengan cara ini, penting untuk di adakan pembangunan sektor pertanian sehingga, dapat bersaing di sektor bisnis lokal dan asing. Pembangunan pertanian di Indonesia tetap menjadi yang paling penting, terutama di daerah-daerah pedesaan karena pertanian telah menjadi penyalur ekonomi masyarakat yang perkembangannya benar-benar meluas, sementara berbagai daerah mengalami perkembangan negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia adalah (1) potensi kekayaan yang sangat besar dan beragam, (2) porsi pendapatan

masyarakat yang sangat besar, (3) banyaknya individu yang bergantung pada daerah ini. untuk kehidupan mereka, (4) menjadi basis pembangunan di daerah provinsi.

Membahas kemajuan yang ada di masyarakat adalah sesuatu yang harus dipikirkan, oleh karena itu, setiap orang pasti membutuhkan lingkungan yang baik untuk masa depan nya agar menjadi sejahtera dan lebih baik kedepannya, karena pencapaian kesuksesan dalam kehidupan individu, semakin banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi Oleh karena itu, dengan adanya sumber daya yang mungkin dapat mengatasi masalah kehidupan individu.

Peningkatan komoditas pertanian di pedesaan akan sekaligus meningkatkan gaya hidup para petani, mengurangi kemiskinan, meningkatkan penyerapan pasar lokal untuk barang-barang industri, dan mendinamisasikan kegiatan pertukaran perdagangan (Lewis 2000). Pertanian memegang peranan penting untuk dikembangkan di negara-negara berkembang, seperti halnya di Indonesia, terutama pada fase awal pembangunan. Dalam menggerakkan dana untuk mengembangkan pertanian, berikut 5 syarat untuk pembangunan pertanian di pedesaan, secara spesifik (1) adanya peluang bisnis untuk barang-barang pertanian, (2) dukungan teknologi yang terus berkembang (3) adanya bahan dan alat produksi secara lokal, (4) adanya produksi untuk masyarakat tani, dan (5) adanya transportasi yang lancar, selain itu harus didukung dengan lima syarat kelancaran, yaitu pelatihan pengembangan khusus, kredit produksi, kerjasama bersama para petani, peningkatan dan perluasan area usahatani, dan penataan kemajuan Pertanian.

Peningkatan di bidang pertanian memiliki arti yang sangat luas karena akan terus berada pada tingkat yang sepenuhnya bertujuan untuk memperluas item dan membangun kemandirian pangan, seperti meningkatkan pendapatan petani, memperluas lapangan kerja, dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan industry bahan baku serta meningkatkan ekspor. Sampai sekarang ini pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Agribisnis sangat lah penting terhadap perkembangan ekonomi dan industrialisasi (Lewis 2000; Ruttan dan Hayami 1984), sebagai komoditas ekspor sumber kesempatan kerja, dan ketahanan pangan (Aalexandratos 1995, Hayami 1987). Selain itu, pembangunan wilayah pertanian merupakan media yang layak untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki pendapatan ekonomi (Sumodiningrat, 2000; Yudhoyono, 2004). sektor pertanian perlu memperluas produksi dan sumber daya yang memungkinkan perubahan dari agribisnis ke industri. Dalam keadaan sektor pertanian yang stagnan jalannya hubungan antar sektor (industri dan agribisnis) tidak terjadi. Dalam kondisi pertanian yang stagnan, persediaan barang-barang pertanian agak tidak elastis untuk merespon terhadap permintaan pembangunan, oleh karena itu, biaya pangan akan meningkat dan sumber daya pertanian jadi terbatas.

Pertanian masih menjadi *prime mover* atau mesin penggerak utama dalam pertanian untuk meningkatkan komoditas pertanian serta pendapatan petani. Oleh karena itu, pembangunan pertanian membutuhkan penyuluh untuk petani dalam meningkatkan pendapatan usaha tani mereka. Kinerja penyuluh pertanian yang baik berdampak pada perbaikan kinerja petani dalam meningkatkan usaha tani. Kinerja penyuluh ini dapat terarah pada masalah-

masalah yang di hadapi oleh petani dalam menyelesaikan budidaya. Oleh karena itu, keuntungan yang berbeda diperoleh dengan mengetahui presentasi penyuluh pertanian, antara lain (1) jalannya program penyuluh pertanian sesuai dengan kebutuhan petani, (2) jalannya rencana kerja penyuluhan usaha tani khususnya kebutuhan petani (3) terdiseminasinya informasi teknologi pertanian secara merata sesuai dengan kebutuhan petani (4) terwujudnya kemitraan usaha yang menguntungkan antara petani pebisnis saling menguntungkan (5) meningkatkan pendapatan dan bantuan pemerintah untuk kesejahteraan petani di setiap daerah. Oleh karena itu, pemeran penyuluh pertanian harus diperhatikan untuk menjaga berlanjutan pembangunan usaha tani. Aktifitas penyuluh harus dimulai dengan membuat program, mengarahkan dan memfasilitasi petani untuk melakukan identifikasi wilayah, merinci rencana kegiatan, melaksanakan program kegiatan dan diakhiri dengan menilai pelaksanaan program penyuluhan.

sunyoto usman (2004) Mengatakan bahwa di dalam pemberdayaan terdapat salah satu sistem penting yang harus di kembangkan di dalam suatu pembangunan yaitu pentingnya untuk melakukan Pemberdayaan terhadap masyarakat. Pemberdayaan pada masyarakat merupakan sesuatu bentuk kekuatan yang sangat penting. Maksud dari kekuatan itu dapat dilihat dari segi fisik, materi, aspek ekonomi (pengembangan kualitas individu dalam berbagai kelompok), solidaritas untuk berpartisipasi, dan kekuatan kewajiban bersama untuk mengikuti dan menerapkan berbagai prinsip dalam pemberdayaan. Karena pemberdayaan sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup para petani pada tingkat kesejahteraan. Perlindungan dan pemberdayaan petani

bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang unggul, melindungi petani dari kekecewaan gagal panen dan resiko harga, memberikan sarana dan prasarana pertanian yang diperlukan dalam mengembangkan budidaya, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang bermanfaat, maju, terkini, bermartabat dan berdaya saing.

Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dengan memanfaatkan lahan di desa yang luas dan subur yang dapat diakses, jika Indonesia diberi predikat negara agraris karena penduduknya sebagian bekerja sebagai petani, selanjutnya berdasarkan pada informasi data hampir 45% penduduk Indonesia bergerak pada sektor pertanian, untuk itu sektor pertanian menjadi salah satu sektor utama yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani Karena tata ruang yang tidak stabil menyebabkan kekurangan lahan pertanian yang bermanfaat bagi kemajuan pembangunan sektor industry, riel estate (pengembangan) sehingga mengakibatkan menciutnya tanah pertanian di desa dan menyebabkan penurunan produksi pertanian, gagal panen, dan lain-lain.

Salah satu kabupaten di Banggai laut yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam yang masih sangat melimpah sehingga tidak heran jika desa ini menjadi andalan terhadap produktivitas pada bidang pertanian. dengan mengandalkan komoditas tanaman pangan, serta tanaman tahunan seperti cengkeh, kopra, dan sebagainya. Jika di lihat beberapa tahun lalu hasil komoditas sungguh sangat

menjanjikan masa depan bagi para petani Di Desa Adean. Namun peningkatan kehidupan masyarakat petani cengkeh desa adean mereka masih belum sepenuhnya menikmati hasil andalan potensi tersebut. Padahal perkebunan cengkeh Mereka sangat menjanjikan. Itu semua di karenakan rendahnya pengetahuan dalam mengelola hasil perkebunan mereka, sehingga pada saat memasuki masa panen hanya sebagian petani yang bisa memanen cengkeh nya, di sebabkan karena Masalah hama dan cuaca. Serta kurangnya tingkat pengetahuan terhadap masalah pupuk, serta naik turunnya harga komoditas yang mengakibatkan petani cengkeh mengalami kelesuan dalam berusaha di bidang pertanian.

Untuk melindungi petani petani cengkeh, pemerintah melalui inpres No. 50 Tahun 1976 menetapkan kebijakan tentang tata niaga cengkeh. Hal itu disusul dengan Surat Pernyataan No. 8 Tahun 1980 yang menetapkan kebijakan harga dasar dan pelaksanaan latihan penyanggan cengkeh oleh PT Kerta Niaga. Selain melindungi petani juga dapat memperluas lapangan kerja koperasi dan menjamin tersedianya cengkeh bagi pembeli pada produksi rokok kretek. pemberdayaan kelembagaan petani membutuhkan pemahaman dan aktivitas fasilitator perubahan sebagai spesialis perubahan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian serta Keterlibatan fasilitator perubahan yang memiliki kapasitas sebanding merupakan salah satu kunci tercapainya proses suatu kegiatan dalam pertanian. maka di butuhkan tanggung jawab Negara serta peran pemerintah sangatlah penting dalam memperhatikan kebutuhan petani demi tercapainya petani yang makmur, di dalam mengolah lahan untuk bertahan hidup dan mempertahankan kebutuhan pokok sehari-

hari. Maka pemerintah harus ikut berpartisipasi dalam memberikan perlindungan bagi petani agar usaha pertanian maju serta memperdayakan petani sehingga tercapai kesejahteraan bagi petani. Hal ini sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan peningkatan pertanian adalah untuk memperluas pembangunan pertanian kepada petani sebesar yang diharapkan. Sampai sekarang, petani telah membuat komitmen yang nyata untuk pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi di daerah.

Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian harus diberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi setiap masyarakat untuk mewujudkan kekuatan pangan, keswadayaan pangan, dan ketahanan pangan secara ekonomis. Perlindungan dan pemberdayaan petani mencakup perencanaan, keamanan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan subsidi pengawas, dan peran serta masyarakat, yang diadakan tergantung pada standar kekuasaan, otonomi, kenyamanan, kemandirian, kelompok, keterpaduan, produktivitas, kesetaraan, dan berkelanjutan. Jenis kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan petani antara lain pedoman impor barang-barang pertanian sesuai musim panen atau kebutuhan konsumsi dalam negeri, menyediakan sarana produksi pertanian yang tepat pada waktunya, kualitas yang pas, dan biaya yang wajar untuk petani. Selain itu, dilakukan pengembangan wilayah usaha tani yang bergantung pada kondisi dan kemampuan aset Sumber daya manusia, bantuan perlindungan petani untuk melindungi petani dari kemalangan gagal panen karena peristiwa bencana

alam, wabah penyakit, hewan menular, perubahan iklim, atau berbagai jenis bahaya yang ditetapkan oleh menteri; dan dapat memberikan bantuan untuk mengurangi kekecewaan para petani akibat gagal panen karena peristiwa luar biasa sesuai dengan batas kemampuan keuangan Negara.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Peran pemerintah lokal dalam memperdayakan petani cengkeh di Desa Adean kabupaten banggai laut sulawesi tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung peran pemerintah lokal dalam Memperdayakan petani cengkeh di desa adean kabupaten banggai laut sulawesi tengah?
3. Rekomendasi kebijakan apakah yang dapat di rumuskan agar dapat meningkatkan kapasitas peran pemerintah lokal dalam memperdayakan petani cengkeh di desa adean kabupaten banggai laut sulawesi tengah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berikut ini adalah tujuan di dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah lokal dalam memperdayakan petani cengkeh di desa adean kabupaten banggai laut sulawesi tengah.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peran pemerintah lokal dalam memperdayakan petani cengkeh di desa adean kabupaten banggai laut sulawesi tengah.
3. Untuk mengetahui rekomendasi kebijakan apakah yang dapat di rumuskan agar dapat meningkatkan kapasitas peran pemerintah lokal dalam memperdayakan petani cengkeh di desa adean kabupaten banggai laut sulawesi tengah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis, untuk menjadi bahan kajian dan analisis terhadap peran pemerintah lokal dalam memperdayakan petani cengkeh di desa adean kabupaten banggai laut.
2. Sebagai bahan referensi untuk di gunakan oleh peneliti lain nya yang akan melakukan penelitian nantinya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, pemerintah bisa mengerti atau memahami apa saja faktor-faktor yang menghambat peran pemerintah lokal untuk memperdayakan para petani cengkeh di desa adean kabupaten banggai laut.

2. Masyarakat petani cengkeh bisa mengetahui bagaimana peran pemerintah didalam memperdayakan para petani cengkeh di desa adean kabupaten banggai laut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian terdahulu selalu di cantumkan di dalam penelitian yang akan di teliti nantinya untuk melakukan perbandingan antara penelitian yang ada sebelum nya dan penelitian yang dilakukan saat ini, penelitian yang di lakukan saat ini dengan judul “peran pemerintah lokal dalam pemberdayaan petani cengkeh di desa Adean kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah” untuk itu dalam penelitian saat ini maka peneliti menggunakan teori pemberdayaan, di mana peneliti berusaha memberitau atau menyampaikan kepada pembaca nantinya tentang kebijakan apa saja atau program apa saja yang di lakukan pemerintah dalam pemberdayaan petani cengkeh di desa Adean, Oleh karena itu peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu untuk di jadikan sebagai Bahan referensi di dalam penelitian saat ini, beberapa penelitian terdahulu yakni:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian terdahulu
1.	Muhammad faizal	Pemberdayaan ekonomi buruh pemetik cengkeh perspektif hukum ekonomi islam di desa compong kabupaten sidrap. 2020	Penelitian kualitatif	1. Pemberdayaan ekonomi di desa compongkab. Sidrap sudah di lakukan meski masih dalam tahap memberikan peluang dan kesempatan menjadi buruh pemetik cengkeh dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat namun pendaptan yang di dapatkan baik pemilik maupun buruh pemetik cengkeh sudah dapat membantu perekonomian keluarga. 2. bentuk perjanjian yang di lakukan buruh pemetik cengkeh berbentuk tidak tertulis/lisan karena masih menggunakan adat kebiasaan dan berdasarkan asas saling percaya di antara mereka.
2.	Sayid basrah lubis	Peran pemerintah desa dalam Pemberdayaan Petani desa ujung serdang kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang 2020	Penelitian kualitatif	1. Peran Pemerintah desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dalam Pemberdayaan petani memiliki Peranan yang sangat baik dalam peningkatan pertanian di desa yaitu sebagai Fasilitator, Pemberian informasi pada kelompok tani, Memotivasi Kelompok tani, Pengawas dan pelaksana Dalam Distribusi 2. Bantuan Pupuk, Pembimbing dan Pengarah

				<p>untuk Petani Dalam pelaksanaan pemberdayaan petani di desa Ujung Bandar pemerintah desa juga melakukan kegiatan kepada petani melakukan pelatihan membuat pupuk kompos dan pelatihan penggunaan alat pertanian modern seperti handtracktor, robot panen padi dengan bantuan dinas pertanian.</p>
3.	Kasming	Peran pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Lompoloang kecamatan pitumpanua kabupaten wajo Tahun 2019	Penelitian kualitatif	<p>Pada aspek Regulator khususnya mengenai aturan/mechanisme serta kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan kelompok tani masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang aturan yang mengikat masyarakat untuk di berdayakan, sehingga masyarakat ikut dengan program pemberdayaan hanya sekedar ikut tanpa ada pembekalan pengetahuan mengenai aturan dan kebijakan pemerintah, sementara dari pihak pemerintah kecamatan sendiripun saat di wawancarai oleh peneliti tidak mampu menjelaskan tentang aturan atau kebijakan pemerintah yang berlaku dalam proses pemberdayaan masyarakat petani karena faktanya dari hasil wawancara dan observasi peneliti pemerintah</p>

				kecamatan sendiri kurang memahami hal tersebut hal tidak adanya kegiatan sosialisai dan kegiatan lainnya dari pemerintah pusat maupun kabupaten terkait dengan hal tersebut.
--	--	--	--	--

Sumber : Hasil Olah Data Penulis,2021

2.2 KONSEP PERAN PEMERINTAH

Peran berarti suatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (Gunawan, 2003) peran juga dapat dijelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula di pinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang di sandang untuk di bawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama. Kedua, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang di bawa seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Terdapat teori peran yang mengatakan bahwa peran atau "*role*" sebagai *the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization's boundaries* (Banton, 1965; Katz & Kahn, 1966, dalam Purwanto, 2003)

Soerjano Soekanto (2002) menjelaskan bahwa peran adalah suatu aspek dinamis yang (status), kedudukannya jika individu menjalankan kewajiban dan haknya yang sama dengan kedudukannya, dari situ maka bisa dikatakan individu itu telah melaksanakan suatu peranan. Selain itu juga ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa teori peran ini memberikan suatu cara di dalam pelajaran perilaku di dalam organisasi, yang memberitahukan bahwa peran ini telah melibatkan pola produk yang telah di ciptakan sebagai lawan dalam tindakan atau perilaku. Dougherty & Pritchard (1985) dalam Purwanto (2003),

ada beberapa syarat-syarat peran yang di kemukakan oleh soerjono soekanto (2002) yaitu :

1. Di dalam peran terdapat norma-norma yang telah di hubungkan berdasarkan tempat seseorang atau posisi di dalam suatu masyarakat. dalam artian ini Menyiratkan serangkaian aturan-aturan yang membimbing seseorang untuk kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran yaitu sesuatu yang menyiratkan tentang perilaku yang bisa di lakukan oleh individu di dalam suatu organisasi masyarakat.
3. Peran ini bisa juga di katakan sebagai individu yang memiliki perilaku yang penting bagi struktur sosial di dalam masyarakat.

J. dwi narwoko dan bagong suyanto (2010) juga menjelaskan bahwa suatu hal yang bisa membimbing orang tersebut di dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Penetapan hak suatu tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Mengoperasikan suatu cara penanggulangan serta mengontrol, agar bisa melindungi kehidupan di dalam masyarakat.

1. Serta di ketahui melalui aspek pemerintahan kata pemerintah atau pemerintahan keduanya di sebut berawal dari kata “perintah” yang merupakan sesuatu yang mesti di wujudkan. Pada saat kata itu terbilang tergabung di sebagian komponen serta membentuk khas dari kata

“perintah” terdapat “keharusan” yang membuktikan komitmen agar mewujudkan sesuatu yang di arahkan.

2. Terdapat dua aspek yang membagi dan yang mendapatkan perintah
3. Terdapat ikatan yang di sesuaikan antara yang membantu dan yang mendapatkan perintah.
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah

“Pemerintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa inggris di digunakan kata “government” Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang di lakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, untuk itu bukan di artikan apabila pemerintahan yang Cuma melaksanakan kewajiban eksekutif saja, melainkan pula mencakup kewajiban lainnya tercantum legislative dan yudikatif, sehingga system pemerintahan adalah pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan Negara itu, dalam Rangka kepentingan rakyat. Beda hal nya dengan pemerintah dalam arti sempit pemerintah hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan di tataran eksekutif. Menurut Woodrow Wilson, pemerintah merupakan suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dalam organisasi kekuatan angkatan bersenjata, hanya dua atau sekelompok individu mulai dari banyak kelompok individu yang sudah di rencanakan bagi suatu lembaga supaya melaksanakan maksud dan tujuan serentak dengan mereka, untuk hal-hal yang mewariskan penjelasan untuk keseluruhan acara kemasyarakatan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan merupakan kegiatan di mana di dalamnya terdapat proses terus menerus tentang perlindungan dan penjaminan kesejahteraan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan baik primer, sekunder, dan tersier yang kesemuanya dijamin melalui mekanisme yang telah diatur oleh konsensus bersama bernama dasar negara dan undang-undang, pemerintahan juga merupakan kegiatan yang harus menghendaki adanya wilayah eksklusif sebagai wujud legalitas kegiatan membangun satu sama lain. Artinya, pemerintahan merupakan kebutuhan komunal dan kegiatan sosial yang tingkat kebutuhannya sudah masuk kategori penting bagi peradaban umat manusia dewasa ini.

Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berwujud republik, yakni yang berhubungan dengan pemerintah serta lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat. Pesan pentingnya adalah pemerintah harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kekuasaan. Kekuasaan yang bertanggung jawab merupakan produk dari demokrasi secara procedural. Pemahaman ini bisa ditelusuri dari gagasan demokrasi yang mengartikan pemerintah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Pemahaman ini secara tegas mengharuskan pemerintah untuk melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Bila amien memaknai pemerintahan dikaitkan dengan pertanggungjawaban, maka penulis Negara modern, MacIver mengartikan pemerintah adalah organisasi yang melaksanakan peran dan fungsi Negara (Agustino, 2011) sedangkan ilmuwan politik terkemuka, Roy C Macridis dan Bernard E Brown sebagaimana dikutip Muhtar Haboddin (2015)

mengartikan pemerintahan adalah tindakan kehendak yang dapat mengubah kebijakan. Karena itu tugas pemerintahan ialah mengidentifikasi masalah dan mencari pemecahannya. Pemerintah ditempatkan sebagai solusi bagi rakyat. Pemerintah adalah solusi karena itu eksistensi pemerintah selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Bagi Negara-negara sosialis sudah tentu peran dan fungsi pemerintahan sangat besar sekali dalam menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, pensiunan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, hingga menjamin ketertiban dan keamanan.

2.3 DESENTRALISASI DAN PEMERINTAH DAERAH

Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan urusan pemerintahan antar pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintah tergantung pada kemungkinan bahwa secara konsisten terdapat urusan pemerintah yang berbeda yang sepenuhnya/terjaga berada di bawah kekuasaan atau wewenang pemerintah. Terjaminnya urusan pemerintah yang menyangkut kelangsungan hidup bangsa serta Negara secara keseluruhan.

hubungan antar pemerintah, Rondenelli mengemukakan bahwa “desentralisasi berarti pemindahan atau penyerahan perencanaan, membuat keputusan atau otoritas manajemen dari pemerintah pusat dan perwakilannya kepada organisasi lapangan, unit-unit pemerintahan yang lebih rendah, badan hukum public, penguasa wilayah luas maupun regional, para ahli fungsional, ataupun kepada organisasi non pemerintah.” Tipe desentralisasinya di

tentukan oleh luasnya pemindahan kekuasaan dan susunan institusional yang di gunakan dalam proses. Empat bentuk desentralisasi dapat di pergunakan oleh pemerintah dalam perencanaan dan administrasi pemindahan kekuasaan :

1. Dekonsentrasi melibatkan pemindahan (transfer) fungsi dan kekuasaan pembuatan keputusan di dalam hirarkhi pemerintah pusat, melalui pengalihan beban kerja dari kementerian-kementerian pusat kepada para pejabat di lapangan, penciptaan lembaga-lembaga lapangan atau pengalihan tanggung jawab kepada unit-unit administrative lokal yang di control dari pusat.
2. Delegasi pada lembaga-lembaga semi otonom atau otonom melibatkan transfer fungsi-fungsi kepada organisasi non pusat, khususnya unit-unit pelaksana proyek dan kekuasaan regional atau fungsional pembangunan, juga menjadi andalan dalam berproses di luar aturan pemerintahan pusat serta dapat melakukan sesuatu di dalam organisasi nasional agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah di di uraikan.
3. Defolusi melibatkan transfer fungsi atau kekuasaan pembuatan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah Lokal.

Dekonsentrasi melibatkan pemindahan (transfer) fungsi dan kekuasaan pembuatan keputusan di dalam hirarkhi pemerintah pusat, melalui pengalihan beban kerja dari kementerian-kementerian pusat kepada para pejabat di lapangan, penciptaan lembaga-lembaga lapangan atau pengalihan tanggung jawab kepada unit-unit administrative lokal yang di control dari pusat.

Transfer pada lembaga swadaya masyarakat merupakan proses pemindahan tanggung jawab untuk fungsi-fungsi dari sector swasta kepada organisasi non

pemerintah.

Dari sisi kepentingan pemerintah daerah, tujuan pertama desentralisasi adalah untuk mewujudkan political equality (kesetaraan politik) melalui pelaksanaan keinginan di dalam desentralisasi untuk bertambah dalam mengungkapkan kesempatan untuk masyarakat agar ikut serta pada saat berbagai ragam kegiatan politik di tingkat lokal. Masyarakat di daerah, tulis smith (1985). Tujuan kedua desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah local accountability (pertanggung jawaban) melalui pelaksanaan desentralisasi di harapkan dapat tercipta peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan daerah, serta hak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintah daerah.

Tujuan ketiga desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah local responsiveness (daya tanggap) asumsi dasar dari tujuan desentralisasi untuk yang terakhir ini yaitu lantaran pemerintah daerah di duga lebih paham mengenai permasalahan yang menghadang kelompoknya, penerapan desentralisasi membentuk suatu jalan yang baik dalam menangani permasalahan serta sekalian memajukan pembangunan sosial suatu ekonomi di daerah tersebut.

2.4 TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH

kehadiran dan keberadaan pemerintah di maksudkan untuk melayani masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Asal usul mengungkapkan bahwa

perorangan, kendati sekecil kelompoknya, apalagi seumpama individu sekali pun, mengharapkan layanan pemerintah. Dengan cara ini, rutinitas individu secara tegas di defensisikan berkaitan dengan fungsi pemerintah. Pemerintahan merupakan penerapan dalam melaksanakan kewajiban pemerintah, sementara itu pemerintah merupakan bagian yang melaksanakan pemerintahan untuk itu bersamaan dengan yang di kemukakan Ridwan HR (2002) yang menyatakan pemerintah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di suatu negara dan bertugas untuk mengelolah system pemerintahan dalam mencapai tujuan Negara.

Fungsi pemerintahan yang di laksanakan pemerintah dalam hal ini adalah “Tugas” yang berkaitan dengan jabatan public. Pengertian ini merujuk pada tugas-tugas pemerintahan yang di laksanakan pemerintah dalam hal ini adalah “tugas” yang berkaitan dengan jabatan public. Pengertian ini merujuk pada tugas-tugas pemerintahan yang di laksanakan oleh pejabat public dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah.

Memasuki abad ke 20 fungsi pemerintah semakin banyak di minati oleh ilmuan sosial, politik, dan pemerintahan, hasil penelusuran berbagai literature menyuguhkan fakta baru bahwa kajian mengenai fungsi pemerintahan semakin banyak di tekuni. Untuk itu, ada beberapa penilaian yang di anggap delegasi dan dapat di percaya yang berlaku dalam memperhatikan unsur-unsur pemerintahan,

fungsi pemerintah dalam pandangan Ryaas sebenarnya harus di tambah. Ilmuan sosial Luer, mengatakan ada tiga elemen pemerintah. Pertama,

pemerintah berperan menciptakan kondisi yang mudah dalam pembangunan ekonomi tetapi tidak berperan aktif. Pendekatan ini dapat berarti, misalnya memberikan jaminan kestabilan sosial serta mendukung berbagai macam pembangunan perdagangan dan industry yang telah dilakukan pengusaha swasta. Kedua, pemerintah secara aktif mengatur proses pembangunan hingga taraf tertentu. Misalnya, berbagai kelompok kepentingan mungkin memerlukan perlindungan dalam hal tertentu sehingga mereka tidak dikalahkan oleh kelompok yang lain yang lebih kuat, dengan demikian, suasana kondisi tetap terjaga. Ketiga, secara langsung pemerintah ikut serta dalam perencanaan pembangunan ekonomi melalui mekanisme seperti nasionalisasi cabang-cabang industry tertentu, spesifikasi prioritas dan tujuan nasional, dan menetapkan berbagai jenis sumber daya yang penting bagi pembangunan (Lauer, 2003) perbedaan fungsi pemerintah sebagaimana yang di utarakan Ryaas dan lauer Nampak jelas berbeda ryaas memberikan tekanan fungsi pemerintahan sangat bernuansa politik pemerintahan, sedangkan Lauer mengarah pada pembangunan ekonomi.

Fungsi pemerintahan yang banyak itu government yang kuat. Sebab hanya dengan pemerintahan yang kuat semua fungsi-fungsi pemerintahan bisa di laksanakan dengan baik sesuai dengan konsitusi. Secara konseptual government yaitu nama yang telah diberikan buat sesuatu yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan di suatu Negeri. System pemerintahan hirarkis mengharuskan terjadi koordinasi yang berjenjang dari pusat sampai ke desa.

Kapasitas bertindak pemerintahan tidak terbatas pada penyedia layanan public, tetapi juga memecahkan persoalan besar seperti isu kemiskinan, perombakan

ekonomi, mengurangi pengangguran, kerusakan lingkungan serta memiliki kemampuan untuk melakukan kerja sama dengan aktor-aktor di luar pemerintahan. Ada sepuluh fungsi pokok pemerintahan, antara lain menjamin keamanan Negara, memelihara keterlibatan masyarakat, menjamin keadilan bagi setiap warga masyarakat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan, peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro rakyat, dan membuat kebijakan yang ramah lingkungan.

Dengan mampu mengenali seperti apa kebutuhan dan keinginan serta aspirasi warga masyarakat maka tentunya pemerintah dapat melakukan langkah dan pelayanan yang terbaik guna mengatasi segala bentuk masalah yang di hadapi oleh warga masyarakat, dengan melalui penyusunan program-program perencanaan pembangunan, baik untuk kepentingan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Adanya program perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi atau peran serta (isprak) masyarakat, memberi batasan yang tegas terhadap pentingnya assessment program yang akan di lakukan oleh pemerintah apakah bisa memenuhi berbagai aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, karakteristik utama fungsi dan tugas pemerintahan selalu berkaitan dengan adanya kompleksitas masalah yang di hadapi, dinamika pemerintahan dan keanekaragaman masyarakat. Pola atau model pemerintahan yang dapat di kembangkan haruslah sesuai dengan karakteristik fungsi dan tugas pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan kompleksitas masalah yang di hadapi.

2.5 KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Konsep merupakan abstraksi atau ide yang dapat di gambarkan tentang mental yang di buat dalam suatu symbol maupun kata. Secara bahasa, pemberdayaan atau kekuasaan berasal dari kata power yang berarti keberdayaan atau kekuasaan. Konsep pemberdayaan di mulai dari penguatan modal sosial di individu atau kelompok yang menggabungkan penguatan modal sosial, mematuhi aturan, dan organisasi, modal sosial yang solid sehingga akan mudah bagi kita untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan masyarakat serta mudah memberikan ilmu pengetahuan pada masyarakat.

Konsep pemberdayaan di kembangkan sekitar Tahun 1970-an yang bermula adanya kesenjangan, kepentingan kekuasaan di antara segmentasi (Lapisan) masyarakat satu dengan lain sehingga muncul pemikiran bagaimana mengatasi fenomena tersebut (Najiyati, asmana dan suryadiputra, 2005). Konsep pemberdayaan menurut pranarka dan prijono (ed). (1996) mencetuskan pemikiran (pemahaman) dari semua itu maka dapat di pahami bahwa konsep pemberdayaan tidak terlepas dengan sebuah gerakan pemikiran untuk bangkit dari ketidakberdayaan (ketidakmampuan). Paulin conroy dalam craig and mayo (1995) mengungkapkan di lema di sekitar pemberdayaan masyarakat eropa yang terpisah-pisah oleh adanya kelas-kelas sosial. Pemisahan dan perbedaan kelas ini termasuk juga dalam klasifikasi warga Negara eropa dan non eropa. Di Negara-negara dunia ketiga, hal tersebut berkembang dalam jangkauan dan skala yang sangat luas. Pasar bebas strategi neo liberal yang pada akhir 1970-an mengembangkan pembangunan ekonomi yang di harapkan ada dampak masyarakat dalam membantu orang miskin

(hikmat,2006) istilah empowerment (pemberdayaan) tidak terlepas dari istilah development (pembangunan). Menurut aziz (2005) dalam (kusnadi 2006) dengan adanya planning (perencanaan), (pelaksanaan) (kebijakan dari pemerintah untuk rakyat), sedangkan pemberdayaan cenderung menekankan aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Isu-isu pemberdayaan menjadi wacana public ketika kebijakan pembangunan kurang atau belum mampu berkontribusi secara adil dan merata pada seluruh masyarakat dalam mengakses sumber daya dan fasilitas lainnya. Meski banyak ragam kecenderungan setidaknya menurut widanti (2011) ada tiga pemahaman dari berbagai pakar dan praktisi antara lain :

1. Pola pemberdayaan menyesuaikan keanekaragaman latar belakang, situasi dan kondisi dari partisipan/ yang di berdayakan. Misalnya cara memberdayakan buruh tanam (ibu-ibu wanita) dengan buruh bajak sawah (bapak-bapak) dengan latar belakang masing-masing partisipan maka cara atau bentuk memberdayakan juga berbeda.
2. Pemberdayaan tentu berbeda dengan substansi yang berbeda. maksudnya kemampuan pekerja sendiri-sendiri yang ahli dalam generalis yang mempunyai substansi serta kemampuan yang beraneka Ragam.
3. Pemberdayaan tidak kaku yang mrngikuti kebutuhan atau permasalahan satu dengan lainnya.

Pemberdayaan merupakan proses memberikan daya/kekuasaan pada sesuatu yang lemah serta membatasi kekuasaan terhadap golongan yang terlalu berkuasa hingga terjadi keseimbangan (Djohani, 2003)

Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dana sosial yang kuat bisa mendukung di dalam keberlanjutan untuk mendirikan rasa kepercayaan terhadap suatu masyarakat tertentu yaitu anggota yang terdapat di dalam kelompok. Untuk itu pemberdayaan bersentuhan dengan rencana mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat kelompok tersebut. Menurut Sukirno (2013) paradigma baru pembangunan di daerah adalah pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, termasuk petani dan buruh tani, melalui penyedia fasilitas dan prasarana publik, pengembangan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, guna memanfaatkan potensi keunggulan sumber daya alam.

Pada dasarnya pemberdayaan di letakkan pada kekuatan tingkat individu dan tingkat sosial yang mengacu pada kemampuan individu, terutama kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka benar-benar memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi :

1. Kebutuhan dasarnya

Masyarakat sudah pasti memiliki kebutuhan dasar, sehingga mereka dapat memiliki satu kebebasan dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kemiskinan, bebas dari keadoman dan juga bebas dari kesakitan.

2. Menjangkau segala sumber produktif

Dengan adanya sumber yang produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan segala sumber produktif yang memungkinkan agar dapat meningkatkan pendapat nya dan memperoleh kebutuhan barang-barang dan jasa segala sumber produktif yang memungkinkan agar dapat meningkatkan pendapat nya dan memperoleh kebutuhan barang-barang dan jasa.

3. Mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi.

Pengembangan yang di lakukan oleh masyarakat bukan sebatas teori saja, tetapi bagaimana mengembangkan suatu daerah pedesaan dan tetap memiliki arti dan kemungkinan untuk berkembang berada di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri.

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang menuju Negara maju. Sebelum menjadi Negara maju, tidak dapat di pisahkan dari (SDM) terutama tercermin dari pemerintah dan masyarakat dalam bersinergi untuk meningkatkan menjadi bangsa dan Negara yang baik dan lebih maju.

Fakta menunjukan bahwa masyarakat di Indonesia adalah masyarakat pertanian, ini menyiratkan bahwa daerah setempat bermata pencaharian sektor pertanian secara umum (pertanian, budidaya, nelayan/perikanan, peternakan, perkebunan, dan Lainnya). Meskipun demikian dalam peningkatan masyarakat sektor pertanian memiliki kemampuan yang sangat beragam, kecenderungan wilayah lokal di pedesaan masih kurang ideal dalam mendominasi hasil proses

dan kemajuan saat ini. Untuk itu menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memperdayakan petani tersebut.

Pemberdayaan petani berperan penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Sebelumnya Dalam program-program pemerintah mencakup dalam hal pembiayaan untuk memperluas serta meningkatkan kesejahteraan petani. Program pemberdayaan ini dilakukan dengan cara memperdayakan petani yang diberi kepercayaan penuh sebagai pengelola kegiatan. petani akan merancang, menentukan topic yang akan di tangani, penyusunan dan pengajuan proposal, penganggaran dana, memilih narasumber, melaksanakan kegiatan, mengontrol dana melakukan pelaporan kegiatan pembelajaran. Petani akan di perkenalkan dengan system penyuluhan yang akan di awasi oleh petani itu sendiri. pelaksana pemberdayaan masyarakat pertanian tidak bisa dipisahkan dari sudut pandang yang vital mulai dari (1) hakikat pemberdayaan, (2) pemberdayaan sebagai kemajuan kawasan lokal (3) prinsip-prinsip dan pendekatan pemberdayaan, (4)teknik pemberdayaan, (5) strategi dan proses pemberdayaan, (6) pendampingan pemberdayaan masyarakat, (7) partisipasi masyarakat, (8)penguatan pengecekan dan penilaian pemberdayaan. Dari sudut pandang ini merupakan pedoman bagi fasilitator atau pihak yang akan memperdayakan masyarakat petani, mulai dari individu, kelompok, masyarakat itu sendiri dan pemerintah pusat hingga daerah. Dari Semua aspek tersebut dapat di tindak lanjuti oleh fasilitator atau individu yang terkait di dalam pemberdayaan masyarakat pertanian. pada umumnya fasilitator memperdayakan masyarakat pertanian dengan cara perencanaan program atau kegiatan yang pengelolaan

nya di atur oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Program pemerintah dalam memperdayakan petani sebelumnya tentang pembiayaan untuk memperluas serta meningkatkan produksi pertanian, kemudian pihak pemerintah hanya memberikan dana untuk meningkatkan produksi tanpa adanya pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Keberlanjutan program ini tentu perlu di perhatikan lagi dalam keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, keberlanjutan ekonomi misalnya petani mampu mempertahankan produksi dan harga yang optimal dalam kebutuhan ekonomi petani itu sendiri. Keberlanjutan sosial artinya petani secara individu, kelompok dan bermasyarakat mampu bekerja sama, berinteraksi dan saling menguatkan satu sama lain dan terus menerus. Proses pemberdayaan menurut widjajanti (2011) merupakan akses secara menyeluruh dan berkaitan masyarakat yang kooperatif dalam penentuan masalah, rencana, pelaksanaan dan evaluasi secara bersama. Pemberdayaan partisipatif ini memiliki arti baik fasilitator dan peserta (masyarakat) terlibat aktif dalam menggerakkan atau merencanakan, membuat program atau solusi bersama-sama menerapkan program tersebut dan sama-sama mengontrol dan mengevaluasi program pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat artinya tipe atau jenis atau desain pemberdayaan yang melandasi program pemberdayaan masyarakat untuk dilakukan oleh fasilitator/pemdamping. Adapun model-model pemberdayaan masyarakat menurut aziz, suhartini, dan halim (2005) antara lain :

1. Model pemberdayaan berbasis padar karya agrobisnis(PKA)

Model ini menekankan pada jumlah tenaga kerja atau wirausaha yang bergerak dalam bidang agrobisnis . misalnya adanya kerja sama antara buruh atau petani dengan pedagang kecil, buruh tani mendapat upah dari petani (juragan) kemudian buruh membeli keperluan ke pedagang di sekitar desa. Atau kelompok tani membuat cabang usaha baru yaitu persediaan dan penjualan pupuk kompos atau bokashi, kelompok tani memerlukan tenaga buruh dalam pembuatan pupuk bokashi/kompos setelah itu petani membeli pupuk tersebut.

2. Model pemberdayaan berbasis grup usaha produktif

Model ini menekankan pemberdayaan pada grup usaha yang produktif. Misalnya fasilitator memfasilitasi bantuan dana atau uang tunai ke petani atau kelompok tani dalam membuka usaha sampingan (olahan hasil pertanian) usaha ini di namakan hal yang produktif

3. Model pemberdayaan berbasis sentra peningkatan agrobisnis komoditi unggulan.

Model ini menekankan pada adanya pusat pengembangan agrobisnis yang menunjukkan komoditas unggulan. Baik di gerakan oleh kalangan pesantren. Atau pihak yang terkait (yang membutuhkan model ini) petani juga mampu dalam model pemberdayaan ini.

4. Model pemberdayaan berbasis perguliran ternak atau pinjaman dana.

Model ini menekankan pada proses bergulirnya pinjaman dana yaitu petani sebagai pihak yang membutuhkan pinjaman.

Konsep pemberdayaan sejauh ini masih mengarah pada pembangunan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan. Salah satu program pengentasan kemiskinan masyarakat terjadi di kota Surabaya. Berdasarkan suhartini et al, (2005) program pemberdayaan di Surabaya merupakan program pemberdayaan berbasis keterlibatan masyarakat (partisipasi) bertujuan untuk memberdayakan kondisi permukiman dan sosial, secara fisik sosial, dan ekonomi.

Permasalahan pemberdayaan masyarakat dapat di lihat dari berbagai aspek antara lain aspek masyarakat/individu, aspek fasilitator, aspek ekonomi, aspek sosial, politik, lingkungan dan lainnya. Aspek masyarakat atau individu masyarakat yakni misalnya kurangnya motivasi, taraf berpikir yang rendah, secara fisik ada yang cacat (belum sempurna), tidak menerima masukan yang positif. Sedangkan aspek fasilitator antara lain belum menguasai sesuatu yang akan di sampaikan, belum memiliki keahlian dalam penguasaan individu atau kelompok, demam panggung, dan lain-lain.

Permasalahan aspek ekonomi antara lain lemahnya posisi tawar masyarakat/petani terhadap komoditasnya, system kelembagaan ekonomi belum ada atau tidak maksimal dan lemah peran petani, kurangnya akses harga atau sumber daya lainnya kendala aspek sosial antara lain masyarakat yang egois, tidak berbagi, dan sulit menerima informasi termasuk membanggakan diri sendiri (sombong) terhadap sesuatu yang dimiliki atau lainnya. Permasalahan politik antara lain kebijakan yang merugikan masyarakat, peran pemerintah tidak membantu masyarakat, pemerintah tidak melibatkan

masyarakat dalam pengambilan keputusan di wilayah desa atau kelompok tani.

Berbagai tantangan atau masalah ini sebaiknya perlu di cermati lagi secara maksimal guna mencari alternative solusi dari masalah tersebut. Misalnya di desa atau kelompok tani misalnya memiliki masalah tentang air (irigasi) maka kelompok tani mengakomodasi dan merapatkan anggota kelompok sehingga alternative solusi mulai pembuatan embung, pembuatan sumur/bora tau lainnya. Masalah masyarakat yang dominan adalah masalah kemiskinan baik kemiskinan individu atau kemiskinan secara sistematis kemiskinan individu di sebabkan karena ketidakmampuan masyarakat (baik fisik/cacat, pekerjaan, rendahnya ketrampilan atau pengetahuan, terbelakang mental) hal ini dapat di atasi dengan solusi individu baik bantuan secara tunai, pemberian pelatihan, dan lainnya. Namun jika kemiskinan secara sistematis yakni kemiskinan di sebabkan karena tidak adilnya system pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan jika semua pihak yang terlibat memiliki gagasan yang jelas dan memiliki aturan untuk pemberdayaan wilayah setempat. Terwujudnya pemberdayaan pertanian tidak dapat di pisahkan dari pekerjaan dan komitmen seseorang, kelompok, masyarakat serta pemerintah, untuk merancang, teknik pelaksana, dalam hal apapun, memperhatikan bahwa ada rencana yang tepat dan akurat sehingga satu dapat di katakan bahwa pencapaian pemberdayaan ini dapat tercapai. Dalam rancangan/rencana, pelaksana yang tepat, dan tujuan atau anggota yang tepat. Pemberdayaan petani sangat penting di lakukan untuk mendorong dan memajukan pola pikir serta pola kerja para petani,

mengupayakan usaha tani serta dapat menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar dapat mandiri, berdaya saing yang tinggi serta bersungguh-sungguh.

Selanjutnya dalam pasal yang berbunyi :

1. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani.
2. Koordinasi sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) di lakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (3).

Upaya pemberdayaan petani ini sangatlah penting bagi petani agar bisa maju dan berkembang dalam bidang pertanian, dengan adanya pemberdayaan ini berupa penyuluhan dan pendampingan, pengembangan system dan sarana pemasaran pertanian, pertanian di Indonesia akan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

2.5.1 TUJUAN PEMBERDAYAAN

Yang ingin di capai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian ini meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Pemberdayaan bertujuan yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari jebakan kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan memiliki empat prinsip utama yang di kemukakan oleh najiyati, asmana dan suryadiputra (2005) sebagai berikut :

1. Kesetaraan

Lembaga atau organisasi yang melakukan sebuah program pemberdayaan harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip kesetaraan, karena hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam pemberdayaan. Prinsip kesetaraan tidak mengenal status atau kedudukan seseorang seperti buruh tanam perempuan dengan juragan, atau petani dengan buruh tani. Oleh karena itu, antara petani yang di berdayakan dengan penyuluh atau pembina yang memberdayakan memiliki kedudukan yang sama. Hal ini memiliki makna memahami kelebihan dan kelemahan satu sama lain dan menumbuhkan kenyamanan di antara semua berkenaan relasi kerja missal dalam sektor pertanian.

2. Partisipatif

Program pemberdayaan yang bersifat partisipatif, di rencanakan, di laksanakan, di awasi dan di evaluasi oleh masyarakat itu sendiri, berpotensi besar dan meningkatkan kemandirian dirinya sendiri. Program pemberdayaan biasanya mampu terlaksana dengan baik, namun tidak dapat berlanjut, karena tidak adanya keterlibatan anggota/partisipan dengan pemberdaya (fasilitator) dalam mengembangkan potensi petani. Masyarakat yang di berdayakan selama ini di abaikan keterlibatannya oleh pemerintah mereka hanya di jadikan objek pemberdayaan melalui bantuan secara langsung, tanpa di libatkan untuk berpartisipasi dalam tahap perencanaannya. Hal tersebut ternyata tidak mampu membentuk masyarakat menjadi

mandiri, dan hanya menjadikan masyarakat semakin bergantung kepada bantuan-bantuan yang di berikan.

3. Keswadayaan/kemandirian

Merupakan hal penting dalam mengembangkan potensi atau kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain merupakan bentuk dari prinsip keswadayaan. Panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat adalah berupa prinsip Mulailah dari apa yang mereka punya. Bantuan teknis yang hendak di berikan oleh fasilitator sebaiknya memperhatikan potensi dan manfaat dari bantuan tersebut, apakah bantuan ke petani dapat di manfaatkan, dan membawa dampak positif lainnya atau tidak.

4. Keberlanjutan

Pemberdayaan bersifat berkelanjutan, artinya pemberdayaan yang secara berjalan terus menerus meskipun ada dominasi pendamping (pemberdaya) pada tahap awal program masih tinggi, akan tetapi secara bertahap di harapkan masyarakat mampu mengendalikan programnya lebih lanjut. Kegiatan pemberdayaan yang tidak berlanjut biasanya hanya meninggalkan bentuk bangunan fisik sebagai jejak bahwa program tersebut pernah di terapkan di daerah tersebut. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat membuat mereka terpaksa menerima sebuah program yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga program tersebut tidak dapat berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dapat di laksanakan berdasarkan beberapa prinsip DuBois

dan miley (1992) yang menyatakan beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat antara lain :

1. Prinsip relasi dalam relasi pertolongan, artinya hubungan antar sesama ini meliputi empati, saling memahami, adanya perbedaan atau ciri khas anggota serta mengutamakan kerja sama di antara anggota atau partner lainnya.
2. Prinsip komunikasi, artinya senantiasa saling hormat, menerima perbedaan, menekankan anggota dan menjaga satu sama lain terutama rahasia.
3. Prinsip pemecahan masalah, artinya dalam pemberdayaan masyarakat sebaiknya fasilitator ataupun partisipan senantiasa memecahkan masalah, meskipun pemecahan masalah bervariasi, menghargai perbedaan solusi, saling memberi kesempatan berpendapat dan bertanggung jawab akan keputusan dan evaluasi.
4. Prinsip refleksi sikap dan nilai profesi, artinya seseorang fasilitator atau partisipan senantiasa bersikap profesional dan sikapnya di jaga, tidak diskriminasi dan menjaga kesetaraan atau keadilan.

Pentingnya pendekatan pemberdayaan masyarakat ini tidak terlepas dengan siapa yang akan melakukan pemberdayaan. Pada sektor pertanian terdapat PPL dalam petani ataupun buruh tani. Tentu strategi pendekatan pemberdayaan ini akan sangat penting bagi PPL (petugas penyuluh lapangan) hal ini akan menyesuaikan dengan pandangan buruh tani dalam memandang pendekatan pemberdayaan seperti kegunaan pendekatan pemberdayaan tersebut, sehingga tingkat kepentingan akan sebuah pendekatan pemberdayaan

petani ini terletak pada kebutuhan dan orientasi masing-masing pihak atau instansi yang terkait dalam bidang ini. pemberdayaan masyarakat ini proses peningkatan proses kemandirian dalam mengembangkan kualitas manusia khususnya di sini petani sebagai subjek dan objek.

Petani dan fasilitator memiliki kesamaan tujuan yaitu meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga mereka menggali potensi yang di miliki, kemudia mngajukan kegiatan-kegiatan yang di rancang dan memiliki peluang atau celah untuk mengatasi masalah ini. jika kegiatan atau program yang secara terus-menerus dalam mengembangkan kualitas hidup (tujuan kesejahteraan). pemberdayaan juga sebuah pendekatan yang relative baru dalam menggerakkan dan mengubah masyarakat sehingga perubahan masyarakat. Sehingga perubahan masyarakat di mulai dari yang berdasarkan skala prioritas, artinya jika masalah masyarakat pada aspek individu maka di selesaikan secara individu namun jika masalah yang di hadapi pada aspek aturan atau kebijakan tingkat desa atau Negara maka yang perlu di ubah adalah aturan atau kebijakan tersebut. Menurut Dwiyanto dan jemadi (2003) terdapat beberapa tigtakan dari pemberdayaan yaitu skala mikro, skala mikro berarti pemberdayaan berada pada lingkungan sekitar tempat tinggal atau desa masyarakat.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan filosofi yang menjadi acuan pembangunan di Negara berkembang termasuk Indonesia. Pemerintah memegang kendali penuh terhadap pembangunan berbagai program pemberdayaan atau bantuan terbengkalai oleh masyarakat karena program tersebut tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat sehingga

alternative yang dapat di ajukan sebagai paradig baru adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Paradigm pemberdayaan masyarakat sebaiknya memberi kesempatan masyarakat untuk merancang sesuai kebutuhan kemudian mengimplementasikan rancangan pemberdayaan tersebut yang di pilih sendiri termasuk dalam pengelolaan program yang biaya sedikit atau besar dari pemerintah dan pihak lain. Proses pemberdayaan ini yaitu suatu rangkaian dalam memberdayakan masyarakat mulai dari identifikasi kebutuhan, masalah, solusi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut secara berkelanjutan. Menurut tampubolon (2001) proses pemberdayaan perlu di ketahui beberapa point antara lain :

1. Mengetahui komunitas lokal (keunikan) artinya ciri khas atau karakteristik komunitas lokal perlu di ketahui oleh fasilitator. Hal ini penting bagi pemberdaya (fasilitator) sebagai input informasi awal sebelum melakukan langkah pemberdayaan masyarakat. Selain itu fasilitator mampu mengenal lebih dekat dengan komunitas lokal.
2. Mengetahui kondisi, artinya fasilitator atau pemberdaya perlu mengetahui kondisi actual mulai dari usia, pendidikan, mayoritas, pekerjaan, status ekonomi, dan sosial serta info lainnya.
3. Mengidentifikasi pimpinan lokal artinya fasilitator atau pemberdaya perlu mengidentifikasi siapa yang memimpin di desa tersebut hal ini sangat penting di lakukan oleh fasilitator dalam rangka mendapat dukungan dari pemimpin setempat.
4. Mensimulasikan masyarakat pada kenyataan dan masalah, artinya fasilitator dalam memberdayakan masyarakat perlu di ketahui kondisi

actual masyarakat dan masalah yang di hadapi oleh masyarakat tersebut. Memang kondisi ini susah mengidentifikasi bagi masyarakat karenamasyarakat merasa tidak memiliki masalah apalagi untuk memikirkan solusi atas masalah mereka.

5. Menolong persoalan dalam mengatasi masalahnya, artinya fasilitator sebagai konsultana atau sahabat bagi petani atau masyarakat dalam membantu mengatasi permasalahan masyarakat itu sendiri.
6. Membantu personal dalam mengidentifikasi masalah yang menekannya, artinya fasilitator memiliki peran membantu ke petani atau masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang menekannya, dengan mengatasi masalah mereka maka akan secara cermat mengikuti dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara efektif.
7. Menguatkan rasa percaya diri, artinya fasilitator menguatkan atau memberi rasa percaya diri kepada partisipan dalam rangka meberdayakan maasyarakat untuk memperoleh tujuan atau mengatasi permasalahan yang di hadapinya.
8. Memutuskan tinndakan program, artinya fasilitator membantu partisipan dalam pengambilan keputusan program yang akan di laksanakan. Kegiatan program ini tentu berdasarkan skala prioritas.
9. Mengeksplorasi kekkuatan dan potensi sumber daya artinya fasilitator memiliki tugas dalam mengeksplorasi kekuatan dan potensi dari partisipan atau masyarakat yang secara bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat.

10. Membantu personal melanjutkan pekerjaan mengatasi permasalahannya, artinya fasilitator membantu partisipan dalam membantu secara individu.
11. Memperkuat kemampuan personal untuk membantu diri sendiri, fasilitator membantu dalam memperkuat kemampuan individu petani/partisipan sehingga petani tersebut mampu mengatasi permasalahan sendiri.

Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dengan keikutsertaan atau partisipasi dari masyarakat, tanpa masyarakat tentu pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana. Mikkelsen (2005) menyatakan keikutsertaan atau partisipasi bagian penting yang menjadi dasar teori maupun praktik di dalam pemberdayaan, baik di lakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Partisipasi dapat di lihat sebagai proses dalam pemberdayaan masyarakat, ibaratnya mulai dari akar, cabang, batang, ranting, daun. Artinya perlu melihat akar permasalahan siapa target sasaran yang memiliki masalah dan faktor penghambat atau dukungan lainnya.

Pemberdayaan juga merupakan kesatuan dalam proses pengembangan kapasitas masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang kuat dan bisa berhasil tentu mendapat dukungan dan kerja sama semua pihak khususnya keaktifan dari anggota masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena keterlibatan masyarakat (partisipan) ini merupakan faktor yang penting bagi pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan penguatan lain, minimal partisipasi masyarakat. Namun jika tidak ada keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat tentu keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat sulit tercapai atau gagal total. Pada suatu program pemberdayaan harus bekerja

dengan teliti dan rajin guna memfasilitasi proses sehingga partisipan merasa positif terhadap partisipasinya (Phillips et al., 2009) tentu semua ini perlu tahapan perubahan dan nada agen perubahan (fasilitator atau pemberdaya). Fasilitator ini bisa dari anggota masyarakat yang memiliki kompetensi atau dari kelompok atau dari instansi yang terkait dengan program pemberdayaan. Menurut Soetomo (2010) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan (partisipasi) masyarakat setiap proses dan menyeluruh mulai dari tahap mengidentifikasi (kebutuhan) dan problem (masalah), planning (perencanaan) program, dan evaluasi serta menikmati hasil. Keikutsertaan masyarakat secara menyeluruh ini dikenal dengan istilah partisipasi profesional, mereka mengikuti semua proses dalam program pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberdayaan mengandung arti peningkatan kualitas hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat antara lain dalam arti :

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan.
2. Peningkatan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
3. Keamanan terjamin

Selaras dengan itu, dalam pembangunan pertanian, tujuannya pemberdayaan diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani, (better farming), perbaikan usaha tani (better business), dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya (better living). Menurut Mardikanto (2015) terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Perbaiki kelembagaan

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada. Sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan demikian tujuan lembaga tersebut akan mudah tercapai. Lembaga yang baik mempunyai visi, misi, tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, program kerja yang terarah.

2. Perbaiki usaha

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Di samping itu kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya.

3. Perbaiki pendapatan

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau income dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4. Perbaiki lingkungan

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan.

5. Perbaiki kehidupan

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Di antaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, di harapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik di harapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6. Perbaiki masyarakat

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti di dukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, sehingga di harapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.5.2. MANFAAT PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan di lingkungan Muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah sehingga membuat mereka tidak tahu dan

tidak mampu. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan individu menyebabkan terjadinya produktivitas yang rendah. Pemberdayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan tanpa henti atau secara berkesinambungan, berdaya, secara sinergis untuk memperdayakan semua potensi yang ada, sehingga daerah setempat dapat memahami berbagai karakter, ketenangan, dan nilainya secara maksimal untuk di jadikan hak dan membina diri secara mandiri baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama, serta budaya. Pemberdayaan di defenisikan pada tingkat individu sebagai kemampuan untuk membentuk kehidupan seseorang beberapa kemampuan timbul dari individu dan pembangunan manusia. Kedua, seseorang individu dan dalam keluarga, ekonomi, sosial, budaya, dan konteks politik yang memainkan peran kuat dalam kemampuan untuk membentuk kehidupan seseorang dan mungkin memaksakan. Pemberdayaan ini tentang pilihan dan kebebasan pemberdayaan bukan tentang dorongan secara terus menerus oleh pejabat dan tuan tanah. Pemberdayaan tentang mendapatkan pendidikan dan kemampuan memberikan kesempatan.

Pemberdayaan terkait dengan keluarga dan struktur sosial yang memungkinkan seseorang untuk bertindak mandiri. Pemberdayaan juga dapat dikatakan usaha menyiapkan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan sehingga usaha dalam peningkatan yang sebelumnya kurang mampu (miskin dan tertinggal) menuju keberdayaan yang sejahtera dan mandiri serta berkelanjutan. (secara terus menerus) Menurut Widianti (2011) cara atau strategi pemberdayaan perlu di tinjau adanya kebutuhan atau masalah ekonomi, sosial, yang perlu di tindaklanjuti dengan strategi yang baik

dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat/rakyat dapat tercapai dalam kehidupan modern. Menurut Zunaedi (2007) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat memakai 4 sudut pandang di antaranya yaitu :

1. Pemberdayaan masyarakat sudut pandang pluralis yakni proses membantu individu atau komunitas yang belum mampu menjadi lebih beruntung, usaha pembelajaran dalam meningkatkan keahlian jaringan dan lainnya merupakan bagian proses pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan usaha belajar dari komunitas atau individu.
2. Pemberdayaan masyarakat dengan sudut pandang elitis yakni usaha atau mengajak elitis dalam upaya memberdayakan masyarakat. Karena kalangan elitis ini merupakan kalangan yang memiliki power (politik, ekonomi) dalam memberdayakan masyarakat. Sehingga sangat sulit dalam memberdayakan tanpa melibatkan kekuatan dari kalangan elitis. Misalnya kalangan elitis dalam menciptakan program pemberdayaan masyarakat dan secara berkesinambungan maka akan memiliki dampak yang sangat besar dari masyarakat tersebut.
3. Pemberdayaan masyarakat dengan sudut pandang strukturalis yakni pihak struktural ini memiliki struktur sosial yang mampu meningkatkan atau menindas masyarakat yang lemah. Peran dari struktural ini sangat besar dalam upaya pemberdayaan
4. Pemberdayaan masyarakat dengan sudut pandang poststrukturalis yakni proses tantangan dan mampu membuat sebuah perubahan. Proses ini

menekankan tingkat intelektual di banding kegiatan, atau praktis sehingga pemberdayaan masyarakat merupakan usaha peningkatan atas perkembangan intelektualitas atau pengeetahuan baru.

Pemberdayaan masyarakat yaitu cara meningkatkan, menswadayakan, memperkuat atau posisi tawar masyarakat pertanian yang stratifikasi sosial di bawah terhadap berbagai tekanan, sehingga masyarakat mampu mengambil keputusan atau bertanggung jawab atas putusan tersebut (najiati, asmana dan suryadiputra,2005).

Penekanan pemberdayaan masyarakat pertanian ini fokus dalam memperdayakan masyarakat petani, artinya petani sebagai pelaku (subjek) selanjutnya pemberdayaan petani di lakukan secara bebas dan bertanggung jawab serta berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi dengan adanya pe,berdayaan secara berkelanjutan sosial, ekonomi di harapkan petani lebih sejahtera dan ketahanan/keswasembadaan pangan terwujud secara berkelanjutan. Program pemberdayaan dilakukan untuk melibatkan masyarakat secara penuh, mulai dari identifikasi masalah, merumuskan, sampai kepada tahap pelaksana dan evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ras, 2013).

Dampak pelaksana pemberdayaan masyarakat adalah penguatan masyarakat untuk mendapatkan upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan yang harus di lakukan secara multiaspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Secara garis besar hal tersebut menekankan pada pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Menurut mulyadi (2013) untuck

mengembangkan potensi masyarakat tersebut, maka diperlukan pengembangan kapasitas masyarakat melalui gerakan kemandirian masyarakat agar mampu mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat, sehingga dapat berperan secara aktif dalam menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah usaha memotivasi dan memberi dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara, antara lain pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka (Karsidi, 2001) dengan demikian masyarakat mampu meningkatkan produktivitasnya dan mampu secara partisipatif memanfaatkan hasil sumber daya alam. Masyarakat menengah ke bawah hingga menengah yang berada pada posos belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan mengingkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Dengan demikian, dapatlah di artikan bahwa pemberdayaan masyarakat sangat memiliki dampak yang sangat nyata bagi masyarakat.

Tetapi dalam hal ini terdapat pula kurangnya pemahaman atau komitmen yang sungguh-sungguh pada diri masyarakat. Walaupun sebagian besar pemegang kendali, termasuk penyusun kebijakan, dapat mendukung dasar-dasar pemberdayaan masyarakat dan memiliki pemahaman yang umum tentang persyaratannya, namun pembuat keputusan dapat kembali. Hal ini bisa saja terjadi Karena kurang memahami bagaimana memberdayakan masyarakat, atau sudah memahami tetapi pada saat di mana terasa ada tekanan sulit di lakukan. Mungkin ada keraguan dari lembaga-lembaga lokal untuk

berbagi informasi tentang kelemahan program-program pemberdayaan masyarakat.

Secara khusus mereka merasa bahwa informasi dapat di gunakan untuk mengendalikan proses, bukan memfasilitasi dan mengembangkan dukungan kebijakan yang tepat. Menurut Ahmad (2012) kegiatan pembangunan manapun juga hanya dapat berlangsung dan mencapai sasaran bila dalam setiap tahapannya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di dasarkan pada informasi yang memadai. Hal ini dapat membawa ke situasi di mana kebijakan dan peraturan yang mendukung sulit atau tidak mungkin di kembangkan karena pendekatan-pendekatan yang berhasil belum di evaluasi dan pelajaran yang di petik tidak di komunikasikan kepada tingkat penyusun kebijakan dan pembuat keputusan.

Pemberdayaan adalah tindakan untuk meningkatkan kekuasaan kepada masyarakat daerah setempat yang kurang mampu secara berkesinambungan, dinamis, serta mencoba membangun, mendorong, serta memotifasi dan membangkitkan kesadaran warga masyarakat untuk ikut dalam keterlibatan menangani semua potensi yang ada agar tercapainya perubahan. Manfaat di lakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Adalah :

1. Membangun Lingkungan yang memungkinkan kemampuan masyarakat daerah untuk berkembang. Potensi terhadap individu yang harus di perdayakan, yang bersumber dari kemandirian pada setiap orang yang terbentang dalam keluarga, perkumpulan serta masyarakat.
2. Memperkuat potensi tenaga yang di miliki oleh daerah dengan melaksanakan kemajuan-kemajuan nyata, menyediakan berbagai sumber

informasi, memberikan prasarana dan sasaran yang besar di bidang irigasi, jalan, dan tenaga listrik. Dalam upaya untuk memperdayakan daerah tersebut. Yang paling penting adalah peningkatan kualitas serta perbaikan sekolah dan kantor kesehatan, serta akses untuk sumber kemajuan keuangan seperti modal, teknologi, informasi, serta lapangan kerja dan pasar.

3. Memperdayakan daerah setempat dengan tujuan untuk mengamankan dan melindungi kepentingan warga masyarakat yang lemah di bidang keuangan.

2.5.3 TAHAP-TAHAP PEMBERDAYAAN

Menurut Soekanto, 1987 Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang di lakukan yaitu :

1. Tahap persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, penyimpangan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

2. Tahapan pengkajian

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan “feel needs” dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

3. Tahap perencanaan alternative program atau kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan “exchange agent” secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4. Tahap pemformalisasi rencana aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

5. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas

untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. Tahap terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Penelitian ini adalah field reseach (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan prosedur analisis. Makna dan proses lebih di tunjukan dalam penelitian kualitatif, landasan teori di manfaatkan sebagai sumber pemandu agar fokus penelitian terarah, dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sebagaimana penulis melakukan penelitian nantinya di desa adean kabupaten banggai laut Sulawesi tengah.

3.2 FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian yang di maksud dalam penelitian ini adalah :

1. Peran pemerintah lokal dalam pemberdayaan petani cengkeh khususnya dalam upaya melakukan pemberdayaan melalui program-program pemerintah di lintas instansi/OPD.
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peran pemerintah lokal dalam pemberdayaan petani cengkeh, baik dalam lingkup internal maupun eksternal.
3. Rekomendasi kebijakan yang di dasarkan atas telaah teoritik dari teori-teori Administrasi public yang relevan dan temuan-temuan penelitian.

3.3 INFORMAN PENELITIAN

Dalam Penelitian yang akan penulis lakukan nantinya di mulai dari penentuan informan (Narasumber) untuk di wawancarai maksudnya orang tersebut yang paham betul serta memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang akan di teliti. yang akan di laksanakan di kantor dinas Pertanian kabupaten banggai laut, berikut pihak-pihak yang terkait yaitu : penyuluh, kepala bidang, sekretaris desa dan Masyarakat petani cengkeh.

3.4 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

1. Wawancara

Wawancara Adalah suatu pertemuan antara individu satu dengan individu lainnya baik berupa kelompok ataupun individu untuk melakukan pertanyaan tanya jawab antara pewawancara dengan yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang relevan mengenai suatu masalah yang akan di teliti. Wawancara yang akan di lakukan dalam penelitian ini adalah tanya jawab oleh pewawancara dengan para informan yang telah di pilih guna mendapatkan data yang di perlukan. Di dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala Bidang, penyuluh, sekretaris desa dan masyarakat Petani cengkeh.

2. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang di peroleh dalam observasi di catat. Kegiatan pencatatan dalam hal ini

adalah merupakan bagian dari pada kegiatan pengamatan. (Nurkencana, 1986). Observasi ini di lakukan secara langsung di lapangan guna mengetahui peran pemerintah dalam memperdayakan petani cengkeh di Desa Adean. Untuk itu, Observasi yang di lakukan di dalam penelitian ini yaitu peneliti mengamati di sekitar lingkungan dari awal penelitian hingga selesai. Penulis menggunakan teknik ini agar bisa mengetahui kondisi sekitar masyarakat sehingga peneliti bisa lebih mudah memperoleh data yang di butuhkan.

3. Dokumentasi

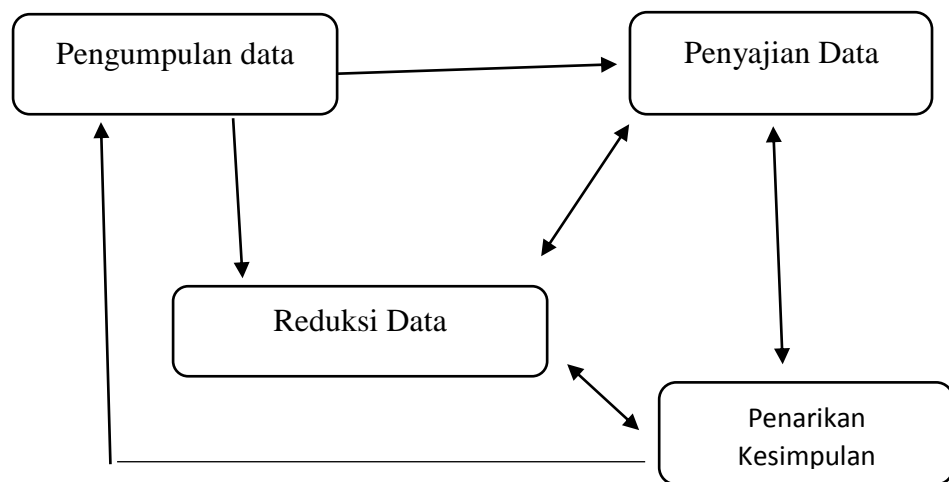
Dokumentasi adalah suatu cara yang di gunakan untuk memperoleh data dan Informasi dalam bentuk buku, arsip, document, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian, dokumentasi di gunakan untuk mengumpulkan data kemudian di telaah. Sugiyono (2015: 329). Berikut Dokumentasi yang di gunakan dalam penelitian ini yakni, dokumentasi yang berbentuk gambar atau foto yang di peroleh pada saat peneitian berlangsung.

3.5 LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini Akan di lakukan di Desa Adean Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah, penulis mengambil penelitian di desa tersebut karena masih banyak petani cengkeh yang belum merasakan peran pemerintah dalam meningkatkan komoditas pertanian cengkeh. Peneliti tertarik memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui sebagaimana peran yang di lakukan pemerintah di dalam melaksanakan pemberdayaan petani cengkeh.

3.6 PROSEDUR ANALISIS DATA

Analisis data adalah suatu metode yang di ambil saat melakukan penelitian dengan memproses data menjadi informasi dan menganalisis suatu data agar mudah di pahami. Menurut Lexy J. Moleong teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang di kerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrument penelitian seperti catatan, document, hasil test, rekaman, dan lain-lain sehingga di peroleh kesimpulan. Di Dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan model interaktif dari miles dan huberman untuk menganalisis hasil penelitian. Aktifitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara terus menerus sampai tuntas, berikut model interaktif yang di maksud :



Gambar 3.1 Analisis data model interaktif (miles dan huberman)

Berikut ini adalah komponen-komponen analisis model interaktif adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data baik dari observasi secara langsung kemudian di lakukan wawancara kepada informan yang telah di pilih agar memperoleh data yang sesuai yang di harapkan.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu data yang di peroleh di lapangan yang hasilnya Bisa Banyak, seorang peneliti diwajibkan dengan teliti untuk membuat catatan-catatan yang terperinci. oleh karena itu semakin sering dan lama peneliti melakukan penelitian di lapangan maka hasil data yang di dapat juga akan bertambah banyak. Oleh karena itu di perlukan reduksi data untuk memperjelas, memperpendek, membuang yang tidak perlu di pakai, dan mengambil simpulan dari data tersebut.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Yuni (2011).

Tahap terakhir ini yaitu Penarikan kesimpulan.

Peneliti Pada saat melakukan pengumpulan data sudah paham dan mengerti semua yang menyangkut dengan pengumpulan data ini, sehingga lebih mudah dalam menarik kesimpulan dan dapat di pertanggung Jawabkan Nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Kabupaten banggai laut Merupakan salah satu di antara 13 kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kota berkedudukan di kota banggai di bentuk berdasarkan undang-undang republic Indonesia No 5 tahun 2013, di mana sebelumnya merupakan bagian dari kabupaten banggai kepulauan. Berada pada kawasan teluk tolo yang mempunyai potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat potensial untuk di kembangkan di kawasan timur Indonesia (KTI). Kabupaten banggai laut terletak antara $1^{\circ} 26' 0''$ Lintang Selatan sampai dengan $2^{\circ} 18' 0''$ Lintang selatan dan $123^{\circ} 0' 0''$ bujur timur sampai dengan $124^{\circ} 20' 0''$ bujur timur di jazirah timur laut pulau Sulawesi. Sebagaimana daerah kabupaten kabupaten banggai laut terdiri dari gugusan pulau-pulau, yaitu terdiri dari 4 pulau sedang dan 286 pulau kecil. Berdasarkan letak geografis dan peta kabupaten banggai laut, memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan laut Maluku, selat kalumbatan dan selat bangkurung
2. Sebelah timur berbatasan dengan laut Maluku
3. Sebelah selatan berbatasan dengan laut banda; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan teluk tolo

Secara administratif kabupaten banggai laut terbagi atas 7 wilayah kecamatan, 3 kelurahan dan 63 desa. Luas wilayah kabupaten banggai laut \pm 12.882,45 km² yang terdiri dari 63 desa. Luas daratan 725,67 km² atau sekitar 5,63% dari luas keseluruhan dan luas laut 12.156, 78 km² atau sekitar 5,63% dari luas keseluruhan dan luas laut 12. 156, 78 km² atau sekitar 94,37% dari luas keseluruhan.

Table 4.1
LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN BERDASARKAN
KECAMATAN
DI KABUPATEN BANGGAI LAUT

Kecamatan	Luas Wilayah (Km)	Persentase (%)	Kelurahan	Desa
Banggai	754.29	5.86	3	7
Banggai Utara	503.59	3.91	-	6
Banggai Tengah	591. 55	4.59	-	8
Banggai Selatan	704. 41	5.47	-	6
Labobo	1,992.98	15.47	-	8
Bangkabung	2,711.99	21.05	-	12
Bokan Kepulauan	5,623.64	43.65	-	16
TOTAL	12,882.45	100	3	63

Sumber : BPS kabupaten Banggai Laut, 2015

1. Gambaran Demografi

Banggai laut atau yang di singkat (Balut) adalah kabupaten yang terpisah, dari daratan Sulawesi tengah atau dapat Dikatakan bahwa daerah yang jauh memiliki jumlah penduduk yang lengkap pada tahun 2013 dengan jumlah 66.722 jiwa. Laju pertumbuhan selama periode 2012-2013 adalah 2,92%. Lebih jelasnya bisa di lihat pada table di bawah ini :

TABEL 4.2
DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT PER
KECAMATAN

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	DATA KEPENDUDUKAN (TAHUN-JIWA)				
			2000	2005	2010	2011	2012
A	Pulau Banggai						
1.	Banggai	86,95	13.415	14.761	19.977	20.663	21.115
2.	Banggai Tengah	68, 19	4.481	4. 894	6.362	6.554	6.680
3.	Banggai Selatan	81,2	3.354	3.641	4.809	4.958	5.057
4.	Banggai Utara	58,05	4.839	5.163	6.007	6.117	6.190
B	Pulau Labobo						
5.	Labobo	85,65	4.955	5.349	5.341	5.375	5.397
C	Bangkurung						
6.	Bangkurung	116,55	6.756	7.268	8.196	8.331	8.419
D	Bokan Kepulauan						
7.	Bokan kepulauan	229,08	9.054	9.913	11.571	11.814	11.971

Sumber : kecamatan Dalam Angka, BPS kabupaten Banggai Laut, 2013

Banyaknya jumlah masyarakat yang terus berkembang setiap tahun. Sebagian besar dari Masyarakat masih terpusat pada kecamatan Banggai. data dari tahun 2013 menunjukkan sekitar 32,91% masyarakat tinggal di Wilayah Banggai. Dimana besar nya kecamatan Banggai sekitar 11,98% dari seluruh wilayah daratan kabupaten Banggai Laut. Pada tahun 2013 terdapat 73,70% dari jumlah penduduk yang berada di kabupaten Banggai kepulauan (termasuk Kabupaten Banggai Laut) yang berstatus kawin, 17,73% belum menikah, 5,94% cerai mati dan selebihnya 2,63% cerai hidup. Yang mana mayoritas usia pernikahan pertama antara usia 19-24 tahun. Besarnya jumlah penduduk di Wilayah Banggai menyebabkan kepadatan penduduk di sub-kawasan ini

sangat tinggi, yakni 253 penghuni untuk setiap km² dengan luas wilayah 86,95 km². Kepadatan penduduk paling sedikit terjadi di Wilayah Bokan Kepulauan yang berjumlah 54 individu untuk setiap km² dengan luas wilayah 229,08 km².

2. Topografi Wilayah

Keadaan permukaan bumi ditunjukkan oleh morfologi atau topografi tertentu, dan dibatasi oleh desain struktur geologi dan genesis atau asal usul dalam proses pembentukannya. Sejauh geomorfologi bergantung pada morfologi, desain, dan proses penataan, morfologi wilayah kabupaten Kepulauan Banggai dapat dibagi menjadi 4 unit utama, khususnya: pegunungan/lereng yang mendasari, pegunungan/lereng karst, perbukitan dan dataran rendah.

- a) Pegunungan di bawahnya terletak di bagian barat Pulau Peleng, memanjang dengan pola selatan-utara dengan ketinggian ± 700 hingga lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut, lereng curam hingga sangat curam dengan kemiringan 40%. Morfologi ini ditemukan di sekitar perbatasan kecamatan Buko, Buko Selatan, Bulagi Selatan, dan Bulagi. Perbukitan struktural terlihat hampir di seluruh pulau, dengan tanjakan dari ± 200 hingga ± 700 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan yang umumnya miring (15-30%) hingga berbukit curam (30-40%), yang ditemukan di Pulau Peleng, Banggai, Labobo, dan Bangkurung. Puncak-puncak bukit terdapat pada bukit Monimit (490 meter) di Pulau Banggai, dan Lereng Basal di bagian timur Pulau Peleng.

- b) Bukit dan pegunungan Karst melibatkan sebagian besar Pulau Peleng, dan secara lokal di pulau-pulau yang berbeda. Tanda morfologi ini adalah contoh kerucut dan lembah karst, dolin, gua, ponor, dan saluran air bawah tanah. Puncaknya berada di Gunung Tinakong (558 meter) dan Bukit Blombong di Pulau Peleng.
- c) Perbukitan intrusif adalah bukit yang terbentuk karena penerobosan batuan gunungapi granodiorit dan diorit, dan sebagian besar terdapat di Pulau Banggai, dan sebagian kecil di Pulau Labobo dan Bangkurung.
- d) Dataran rendah terbentang di sepanjang wilayah pesisir dan lembah-lembah antar perbukitan atau pegunungan, yang sebagian besar dijumpai di bagian utara Pulau Peleng, dan sebagian kecil di selatan Pulau Peleng dan selatan Pulau Banggai.

3. Kondisi Sosial

Peningkatan di bidang pendidikan dapat ditunjukkan dengan kemajuan pada institusi. Serta tingkat partisipasi sekolah dari tahun ke tahun lainnya. Jumlah sekolah di daerah Banggai Laut pada tahun 2014 berkembang dari pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2014, jumlah SD/MI tercatat 82 sekolah, SMP/MTs 45 sekolah, dan SMA/Ma/ sederajat 22 sekolah.

4. Sumber Mata Pencaharian

Masyarakat di kabupaten banggai laut mempunyai berbagai macam jenis pekerjaan yaitu sebagai petani, kebanyakan dari mereka bekerja pada bidang pertanian karena potensi tanah yang subur dan menjanjikan serta meningkatkan taraf hidup para petani. Masyarakat banggai laut juga

mengenal pertanian tanaman padi, jagung, coklat, ubi, kelapa dan masih banyak lagi Selain itu masyarakat banggai laut bekerja sebagai pedagang, nelayan, pegawai swasta, serta PNS.

Di Desa Adean berbagai macam petani seperti petani kelapa, petani coklat, petani cengkeh dan masih banyak lagi yang bermata pencaharian sebagai petani, khususnya petani cengkeh banyak petani yang mempunyai pohon cengkeh tetapi di dalam penelitian ini penulis hanya mengambil 6 orang petani cengkeh saja di karenakan 6 orang ini yang sudah cukup lama dalam mengenal pertanian cengkeh dan sudah menikmati hasilnya, untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel di bawah ini :

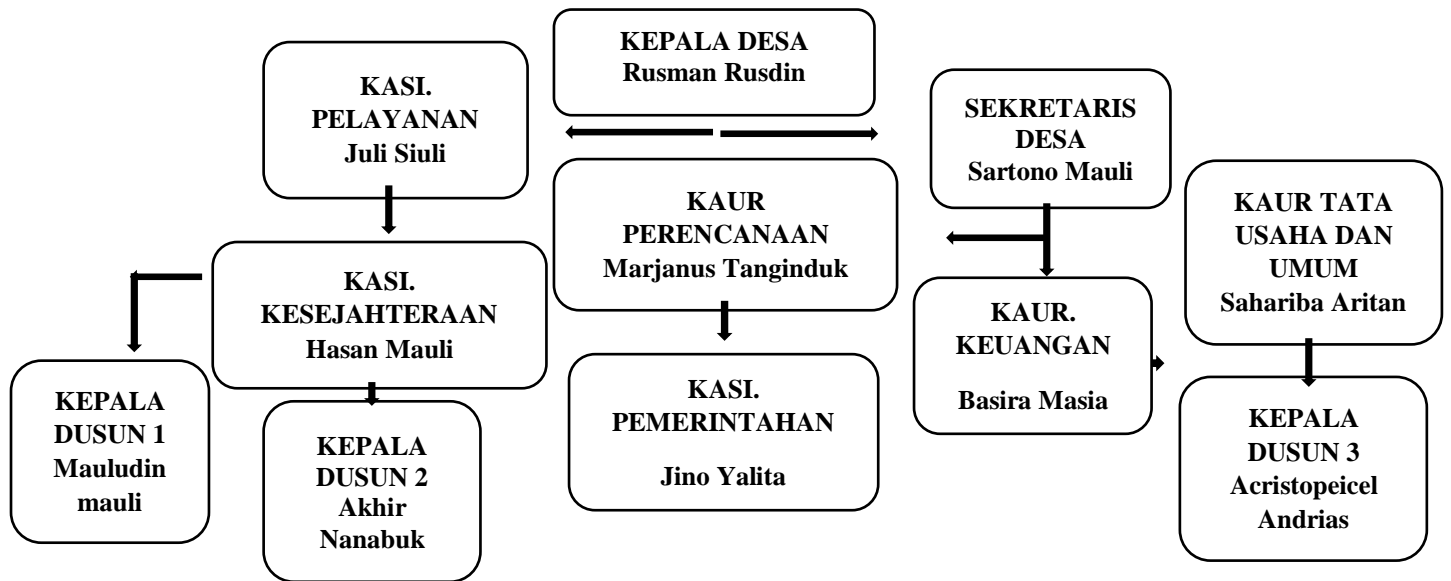
TABEL 4.3
IDENTITAS INFORMAN PETANI CENGKEH DI DESA ADEAN

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	LUAS LAHAN	PENGALAMAN (TAHUN)
1.	H. Jahama	70 thn	SMP	2 Hektar	30
2.	Ajinah B.	70 thn	SD	2 Hektar	36
3.	Basri Adjahum	45 Thn	SMP	1 Hektar	30
4.	Jail Sonobuk	67 Thn	SD	1 Hektar	20
5.	Harsani	56 Thn	SD	1 Hektar	17
6.	Kasno	68 Thn	SD	2 Hektar	20
Jumlah				9	153

Sumber : wawancara Langsung

Di lihat dari hasil wawancara langsung antara penulis dengan Petani cengkeh dapat di lihat bahwa yang lebih lama Menanam Cengkeh adalah Ibu Ajinah B, yang sudah 36 Tahun Menanam cengkeh, dengan tingkat pendidikan Hanya sampai SD, dan Beliau memiliki luas lahan Cengkeh sekitar 2 Hektar.

4.2 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DESA ADEAN 2017-2023



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa adean

Sumber : Kantor Desa Adean

4.3 PERAN PEMERINTAH LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN PETANI CENGKEH DI DESA ADEAN

Di desa Adean Kabupaten Banggai Laut, Keberadaan pemerintah untuk Melayani masyarakat, karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan ini merujuk pada tugas-tugas pemerintahan seperti memberikan bantuan kepada para petani dalam rangka pembangunan pertanian. Untuk itu peran pemerintah sangatlah penting dalam melayani dan membantu masyarakat berikut ini beberapa hal yang mencakup pentingnya pemerintah yaitu :

- Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melayani petani dalam artian pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membantu petani dalam mengembangkan produksi pertanian, karena kedepannya pertanian sangat di butuhkan.

- Pemerintah ada untuk melindungi dan membantu para petani dari ketidakadilan di dalam berdagang serta memperdayakan masyarakat agar menjadi mandiri.

Dalam Hal ini Pemerintah Telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dalam Memperdayakan Petani Cengkeh seperti :

- 1) Pembagian bibit Cengkeh
- 2) Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada para petani cengkeh tentang bagaimana cara pemupukan tanaman cengkeh serta jenis-jenis pupuk yang di gunakan dan lain-lain.

Ada aturan-aturan dalam pemerintahan yang mengikat yang di sebut dengan regulasi, di mana masyarakat tersebut untuk mengikuti aturan-aturan yang di buat untuk mencapai tujuan bersama artinya masyarakat menyepakati serta terikat untuk mengikuti aturan yang sudah di buat oleh pemerintah, masyarakat akan kena sanksi apabila melanggar regulasi. Arahan di dalam regulasi dalam pelayanan pertanian, di situ pemerintah harus melaksanakan, serta memantau peraturan dalam system pelayanan pertanian, pemerintah juga merinci rencana-rencana keseluruhan system pertanian. sebagai regulator, pemerintah melaksanakan, serta mengawas serta menjamin agar pelayanan pertanian di dalam organisasi memberikan pelayanan yang baik dan bermutu.

Seperti Hasil Wawancara yang telah di sampaikan Oleh pak Jabran selaku Kepala bidang.

“sebagai kepala bidang kami mendukung pelaksanaan program sehingga berjalan dengan apa yang di harapkan serta mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada petani cengkeh agar dapat berinovasi, membuat regulasi, memberikan pelayanan dan juga memperdayakan masyarakat petani agar dapat merubah taraf hidup masyarakat petani”. (Wawancara dengan J tanggal 21 januari 2022).

Dari Hasil Wawancara di atas yang telah peneliti laksanakan dapat di simpulkan bahwa pemerintah telah memberikan seperti apa yang di butuhkan para petani, serta pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah dan pelayanan yang terbaik guna mengatasi segala bentuk masalah yang di hadapi oleh para petani dengan melalui penyusunan program-program perencanaan pembangunan.

Hasil Wawancara dengan penyuluh yang Mengatakan Bahwa :

“system pelaksanaan penyuluhan di lakukan dengan penyuluh pertanian menemui petani di kantor desa atau langsung menemui petani di rumahnya guna untuk menyampaikan materi mengenai cara pemupukan tanaman cengkeh, jenis-jenis pupuk yang di gunakan, teknik pengendalian hama dan penyakit di sertai jenis-jenis pestisida yang di gunakan bahkan mengantar langsung petani di kebun untuk mengajari petani mengenai cara pemupukan, pengendalian hama dan penyakit”. (Hasil wawancara dengan S tanggal 21 januari 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa :

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat pertanian tidak terlepas dari peran dan kontribusi individu, kelompok, masyarakat dan pemerintah, dalam merancang ketepatan metode, melaksanakan, bahkan itu semua sudah ada desain yang tepat dan akurat sehingga dapat di katakan keberhasilan pemberdayaan ini dapat di katakan berhasil pada rancangan/rencana. Tepat pelaksana, tepat sasaran atau partisipan serta ketepatan dalam keberlanjutan pemberdayaan masyarakat pertanian.

Hasil Wawancara Dengan salah satu Masyarakat petani yang mengatakan bahwa:

“Penyuluhan yang di lakukan oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) berada pada kategori baik, sebab sangat sesuai dengan kebutuhan petani,

tepat sasaran dan dapat memecahkan permasalahan yang ada secara bersama. Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, penyuluh mampu memahami makna pengertian, prinsip, tujuan penyuluhan pertanian dan siapa yang menjadi sasarannya sehingga penyuluhan tersebut berhasil, serta mengevaluasi penyuluhan pertanian untuk memperoleh hasil yang optimal. (wawancara yang di lakukan peneliti dengan R tanggal 22 januari 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa :

Penyuluhan yang di lakukan sudah berada pada kategori baik, karena kemampuan penyuluh pertanian yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan menurut Lucie (2015) di mana perubahan yang di lakukan tidak semata-mata karena penambahan pengetahuan saja, namun di harapkan juga adanya perubahan pada keterampilan sekaligus sikap mantap yang menjurus kepada tindakan atau kerja yang lebih baik dan menguntungkan.

Hasil Wawancara juga yang di sampaikan oleh salah satu masyarakat petani yang mengatakan bahwa :

“saya sangat berterima kasih sekali atas penyuluhan yang di lakukan oleh pemerintah, tetapi saya tidak pernah tau jika ada penyuluhan yang di laksanakan, saya ketinggalan informasi mengenai kegiatan penyuluhan, dan pembagian bibit cengkeh”. (wawancara dengan H tanggal 22 januari 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa : kegiatan penyuluhan telah di laksanakan oleh pemerintah hanya saja terjadi miskomunikasi antara pendamping/pemberdaya dengan anggota Masyarakat.

1. Pelayanan

Pelayanan mencakup pelaksanaan tugas Negara dalam melayani warga Negara melalui organ pemerintah dan aparat pemerintah. Aparat menjalankan

amanah yang tertuang dalam undang-undang dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran warga Negara Indonesia. Pelayanan dapat di kategorikan sebagai upaya dalam menyiapkan, menyediakan, atau mengurus kepentingan warga masyarakat.

Peran pemerintah untuk melayani public sangat besar tujuan di bentuknya pemerintah berkaitan erat dengan fungsi pelayanan yang di laksanakan oleh pemerintah masa sekarang. Sejalan dengan pernyataan rasyid (1997) yang menjelaskan bahwa pemerintah di bentuk secara utama bertujuan bertujuan untuk mengawasi system ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupannya dalam keadaan yang wajar. Rasyid (1997) menegaskan bahwa pelayanan pada hakikatnya merupakan satu dari tiga fungsi wajib pemerintahan, di samping fungsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seorang aparat pemerintah di nyatakan berhasil dalam melaksanakan misi pemerintahan dapat di lihat dari kemampuannya dalam menjalankan tiga fungsi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah adalah suatu institusi yang menjalankan tugas Negara “pemerintah merupakan seluruh alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara (Ndraha,1990). Dalam pelayanan terdapat asas-asas yang harus di jadikan pedoman oleh aparat pemerintah yaitu :

1. Kepentingan umum

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

2. Kepastian hukum

Jaminan terwujud nya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

3. Kesamaan Hak

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

4. Keseimbangan Hak dan kewajiban

pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus di laksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

5. Keprofesionalan

Pelaksana pelayanan harus sesuai dengan kompetensi dan bidang tugas

6. Partisipatif

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan Negara yang adil

8. Keterbukaan

setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang di inginkan

Bentuk pelayanan yang di terimah oleh masyarakat dari pemerintah dapat di kelompokkan kedalam beberapa jenis pelayanan yaitu :

1. Pelayanan barang

Merupakan pelayanan dimana outputnya adalah berbagai bentuk atau jenis barang yang di perlukan oleh masyarakat

2. Pelayanan jasa

merupakan pelayanan di mana outputnya berbagai bentuk jasa yang di perlukan oleh masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah adalah pla pelayanan satu atap. Yang di keluarkan oleh menteri pemberdayaan aparatur Negara (menpan) melalui surat keputusan menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang pedoman pelaksana pelayanan satu atap antara lain di sebutkan bahwa dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang. Aparatur Negara dalam hal ini dititikberatkan kepada aparatur pemerintah hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan barang dan jasa.

Pemerintah menjadi tempat penyedia pelayanan public yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Maksud dari pelayanan ini adalah bagaimana pemerintah menjadi atau berperan menjadi fasilitator atau menjembatani petani cengkeh yang berada di desa adean kabupaten banggai laut sehingga masyarakat bisa menambah pengetahuan mereka mengenai cara menanam cengkeh yang benar dan baik. Agar tanaman cengkeh yang di hasilkan bisa menjadikan mereka sejahtera dalam produktivitas pertanian cengkeh.

Seperti hasil wawancara yang di sampaikan oleh Kepala Bidang antara lain beliau mengatakan Bahwa :

“kami sebagai pemerintah telah mengadakan pembinaan serta pelatihan kepada petani cengkeh serta sebisa mungkin memberikan pelayanan yang baik serta mendukung pelaksanaan program agar supaya bisa berjalan sesuai dengan yang di harapkan” (wawancara dengan J kepala Bidang tanggal 21 januari 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat kita Tarik kesimpulannya bahwa pemerintah telah memberikan pelayanan yang baik yang menyangkut segala usaha yang di lakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama, guna untuk bisa mendapatkan kepuasan di dalam hal pemenuhan kebutuhan.

2. Pemberdayaan

Pemahaman tentang pentingnya proses pemberdayaan maka partisipasi masyarakat menjadi penting guna kelangsungan proses itu sendiri menurut rahayu dan budi (2013) pemberdayaan bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipiel dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Pemberdayaan jg di arahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat yang mengarah pada kemauan dalam mengembangkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan untuk kesejahteraan (Ristianasari, muljono and S. Gani, 2013).

Pemberdayaan sangat menekankan pada proses mendorong/memotivasi setiap individu agar memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Proses pemberdayaan yang di klasifikasikan menjadi tiga yaitu :

Tipe 1.

- Pencapaian tujuan
- Kepuasan terhadap hasil
- Terjadinya perubahan

Tipe 2.

- Lebih dari sekedar pencapaian tujuan
- Kepuasan dan pengakuan terhadap proses
- Terjadinya perubahan.

Tipe 3.

- Kepuasan dan pengakuan terhadap strategi
- Terjadinya perubahan.

Dengan demikian, pemberdayaan ini merupakan partisipasi Aktif, nyata dan mengutamakan potensi-potensi masyarakat yang dinamis dan hasilnya benar-benar terukur, sehingga pemberdayaan menjadi upaya korektif terhadap konsep pemberdayaan yang pasif itu. Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi yang ada pada diri setiap individu dengan memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang di miliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada. Seperti halnya pemberdayaan merupakan proses pribadi karena masing-masing pribadi

mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahaman terhadap dunia tempat mereka tinggal. Pemberdayaan di artikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis.

Menurut Sidiq dan Resnawaty (2017) partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pilihan strategi yang tepat di harapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat (Noor, 2011). Selain itu strategi yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan adalah penyadaran. Karena dalam proses pemberdayaan di perlukan kesadaran masyarakat terhadap minat dan kepentingan pada program pemberdayaan.

Untuk itu, dalam hal ini pemerintah berperan aktif untuk mendorong serta membantu para petani dalam hal pemberdayaan agar produktivitas pertanian terutama cengkeh bisa mensejahterakan petani. Pemerintah daerah harus bisa membuat berbagai sosialisasi agar bisa menyadarkan petani-petani cengkeh yang baru maupun yang sudah berpengalaman agar lebih paham lagi dalam mengelolah Tanaman cengkeh.

Seperti yang sudah di sampaikan oleh Kepala bidang dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Kegiatan penyuluhan di lakukan dalam satu minggu 4 hari kerja yaitu pada hari senin sampai dengan kamis, hari jumat kordinasi di BPP dan pembuatan pelaporan pelaksanaan penyuluhan tingkat WKPP (Wilayah kerja penyuluh pertanian) mencakup beberapa desa binaan dengan system penyuluhan mengunjungi kelompok tani untuk membicarakan terkait persoalan dan hal lainnya yang di hadapkan oleh petani misalnya pengendalian hama dan penyakit tanaman cengkeh, cara pemeliharaan tanaman yang baik, pemupukan dan pembibitan tanaman yang benar.

Penyuluh hanya menggunakan media cetak dan media elektronik seperti poster, folder, foto dan video dalam menyampaikan materinya. (Hasil wawancara dengan J kepala bidang tanggal 21 januari 2022)

Dari hasil wawancara di atas bisa di Tarik kesimpulannya Bahwa:

Pemberdayaan masyarakat pertanian memiliki peranan penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Untuk itu di lakukannya sistem penyuluhan berdasarkan kebutuhan petani yang di fokuskan untuk mencapai tujuan utama program yakni peningkatan kesejahteraan petani.

Hasil wawancara juga dengan sekretaris desa yang mengatakan bahwa :

“Pemerintah membagikan sejumlah bibit pertanian salah satunya bibit cengkeh, bibit pala, bibit jagung, dan beberapa bibit-bibit lainnya, ada juga sapi yang di berikan kepada salah satu kelompok untuk di pelihara.

(Hasil wawancara dengan SM selaku sekretaris desa adean Tanggal 22 januari 2022)

Kesimpulan dari Hasil wawancara sekretaris desa yaitu :

Pemerintah telah menjalankan tugasnya sebagai fasilitator dalam menjalankan tugasnya dengan baik di lihat dari bantuan yang telah di berikan pemerintah kepada petani cengkeh sudah cukup memadai.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang juga mengatakan bahwa:

Saya sering ketinggalan informasi jika ada pembagian bibit cengkeh ataupun yang membahas tentang pertanian. pembagian bibit nya juga tidak merata, hanya beberapa orang saja. (Hasil wawancara dengan A masyarakat petani cengkeh tanggal 22 januari 2022)

Kesimpulan dari pada hasil wawancara Di atas yaitu :

Kegiatan pemberdayaan di lakukan dengan mengadakan program (rencana yang sudah di tetapkan oleh pihak pemerintah atau instansi) dengan melakukan program pemberdayaan melakukan pelatihan, pemberian pupuk, dan juga pembagian bibit pertanian maka program pemberdayaan tersebut berasal dari pemerintah atau instansi tersebut. Karena sebuah program maka pendanaan, orang yang bertugas, sasaran pemberdayaan, waktu dan tempat sudah terprogram.

4.4 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PERAN PEMERINTAH LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN PETANI CENGKEH DI DESA

1. Faktor pendukung

Adalah yang memuat semua faktor yang sifatnya ikut mendorong. Serta mendukung pelaksanaan dan jalannya program, Faktor pendukung akan berpengaruh terhadap proses pemberdayaan petani cengkeh. Faktor pendukung juga ikut berperan dalam perilaku individu maupun kelompok, demi jalannya program yang di laksanakan agar berjalan dengan Baik. Seperti Wawancara yang di sampaikan oleh Kabid pertanian yang mengatakan Bahwa :

“Faktor pendukung dalam pemberdayaan petani cengkeh yaitu hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari pada sebelumnya yang berperan penting dalam proses yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas ataupun motivasi dalam melakukan sesuatu secara Aktif dalam pengelolaan dan keberhasilan suatu program pada bidang pertanian, yaitu adanya bantuan yang dapat meringankan beban petani, serta adanya program pemberdayaan petani dan dukungan dari pemerintah daerah. (Hasil wawancara peneliti dengan J kepala bidang tanggal 21 Januari 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung yaitu semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya terjadinya sesuatu.

2. Faktor Penghambat

Adalah faktor yang menghambat atau menghalangi jalannya suatu hal atau suatu program yang di jalankan. Faktor penghambat terdiri dari dua kata yang memiliki arti yang berbeda yaitu faktor dan penghambat. Faktor menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Adapaun arti kata penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, menurut kamus besar bahasa Indonesia kata penghambat di terjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang membuat (Merintang, menahan, menghalangi).

Sedangkan pengertian dari hambatan adalah suatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal kemudian arti dari kata hambat yang menjadi kata dasar Penghambat memiliki arti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar berdasarkan kutipan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu, Sehingga di perlukan antisipasi dan di kurangi agar tidak mengganggu jalannya suatu program pemberdayaan petani cengkeh yang di laksanakan.

Hasil wawancara dengan Selaku kepala bidang yang mengatakan bahwa :

“Modal, pendidikan, penguasaan teknologi, hama dan cuaca yang tidak menentu. Modal yang sedikit membuat petani belum bisa mengembangkan usaha taninya, sehingga hasil ataupun produktifitas pertanian belum

maksimal dan pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi petani dalam menerima informasi ataupun teknologi terbaru. Rendahnya pendidikan petani membuat mereka tidak mampu mengantisipasi cuaca yang tidak menentu ataupun hama yang dapat menyerang cengkehnya sehingga dapat mempengaruhi pendapatan rumah tangganya. (Hasil wawancara peneliti dengan J kepala Bidang Tanggal 21 Januari 2022)

Kesimpulan dari pada hasil wawancara di atas yaitu :

Hambat yang berarti penghambat yang membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar, hambatan ini adalah keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan kegiatan terganggu.

Dari semua jawaban dari pada hasil wawancara di atas dapat kita rangkum atau dapat kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sangat lah berperan di dalam pertanian, kenapa, karena tanpa ilmu pengetahuan dan juga teknologi, masyarakat petani cengkeh tidak bisa mencapai hasil pertanian yang maksimal. Untuk itu Ilmu pengetahuan sangatlah penting di dalam pertanian.

4.5 TATA NIAGA PERTANIAN CENGKEH

Dampak dari pada tata niaga cengkeh di desa adean yaitu 2 tahun terakhir ini hasil panen cengkeh hanya sedikit petani cengkeh yang menikmati hasil panennya, itu sangat berdampak pada kebutuhan pendapatan ekonomi petani cengkeh, apalagi pada saat masa panen cengkeh, harga cengkeh relative rendah, dan setelah cengkeh sudah tidak ada sudah habis masa panennya, barulah harga cengkeh naik. Tataniaga merupakan salah satu aspek yang menekankan bagaimana suatu produksi dapat sampai ke tangan konsumen. Rahadi, (1993) menyebutkan bahwa tataniaga dapat dikatakan efisien apabila

mampu menyampaikan hasil produksi kepada konsumenn dengan biaya semurah-murahnya dan mampu mengadakan pembgian keuntungan yang adil dari keseluruhan harga yang di bayar konsumen kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi tataniaga. Kohls dan uhl (1985) mendefinisikan bahwa, tataniaga pertanian merupakan keragaman dari semua aktivitas bisnis dalam aliran barang atau jasa komoditas pertanian mulai dari tingkat produksi (petani) sampai konsumen akhir, yang mencakup aspek input dan output pertanian.

Kohls dan Uhl (1985) menggunakan beberapa pendekatan dalam menganalisis sistem tataniaga yaitu :

1. Pendekatan Fungsi (*The Fungsional Approach*) Merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui fungsi tataniaga apa saja yang dijalankan oleh pelaku yang terlibat dalam tataniaga. Fungsifungsi tersebut adalah fungsi pertukaran (pembelian dan penjualan), fungsi fisik (penyimpanan, transportasi, dan pengolahan) dan fungsi fasilitas (standarisasi, resiko, pembiayaan, dan informasi pasar)
2. Pendekatan Kelembagaan (*The Institual Approach*) Merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui berbagai macam lembaga atau pelaku yang terlibat dalam tataniaga. Pelaku-pelaku ini adalah pedagang perantara (merchant middleman) yang terdiri dari pedagang pengumpul, pedagang pengecer, pedagang spekulatif, agen, manufaktur, dan organisasi lainnya yang terlibat.
3. Pendekatan Sistem (*The Behavior System Approach*) Merupakan pelengkap dari pendekatan fungsi kelembagaan untuk mengetahui

aktivitas-aktivitas yang ada dalam proses tataniaga, seperti perilaku lembaga yang terlibat dalam tataniaga dan kombinasi dari fungsi tataniaga.

Indonesia adalah Negara penghasil cengkeh terbesar di dunia, pada tahun 2010 Indonesia memiliki 456.000 hektar lahan cengkeh, dengan produksi mencapai 140.000 metrik ton. Cengkeh (*syzygium aromaticum*, syn. *Eugenia aromaticum*) adalah tangkai bunga kering beraroma dari keluarga pohon *myrtaceae*. Cengkeh atau dalam bahasa Inggris disebut cloves adalah tanaman asli Indonesia yang banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di Negara-negara Eropa, dan sebagai bahan utama rokok kretek.

Hampir di semua provinsi di Indonesia memiliki tanaman cengkeh sedangkan 5 provinsi penghasil cengkeh terbesar di Indonesia adalah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Di Indonesia tanaman cengkeh memiliki tiga varietas unggul yang bisa ditemukan pada perkebunan cengkeh, tiga varietas unggul yang bisa ditemukan pada perkebunan cengkeh yakni:

1. Cengkeh si putih. memiliki helai daun cukup besar, berwarna hijau kekuningan, bercabang kurang rimbun, memiliki bunga yang besar dan berwarna kuning, tiap rumpun terdiri dari belasan bunga.
2. Cengkeh si kotok. Memiliki helai daun kecil, berwarna hijau kehitaman mengkilap, cabang yang cukup rimbun, memiliki bunga yang tiap rumpun nya terdiri dari 20-50 bunga berwarna kuning kemerahan.
3. Cengkeh Zanzibar. Memiliki helai daun panjang, berwarna hijau gelap, bunga berwarna kemerahan. Keunggulan dari tanaman cengkeh ini

adalah produksi yang sangat tinggi sehingga varietas ini merupakan varietas yang terbaik.

Tanaman cengkeh ini pada umumnya akan menghasilkan buah pada usia 4-7 tahun. Tanaman ini merupakan tanaman tropis yang sangat cocok untuk di tanami di Indonesia. Cengkeh menginginkan iklim yang panas dengan konsumsi sinar matahari 8 jam per hari, dengan tingkat hujan yang merata karena cengkeh tidak tahan terhadap iklim panas yang berkepanjangan

Tanaman cengkeh dapat tumbuh pada tanah yang gembur dengan drainase yang cukup baik. Jenis tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman cengkeh yaitu tanah andosol, latosol, dan podsolik merah. Untuk mempertahankan Negara Indonesia agar tetap menjadi Negara penghasil cengkeh terbesar di dunia beberapa upaya harus di lakukan di antaranya adalah dengan melakukan perbaikan dalam penanganan pascapanen agar mutu dan kualitas bunga cengkeh kering dapat terjaga dengan baik.

4.6 PERAN PEMERINTAH MENURUT GEDE DIVA (2009)

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi semua program untuk mencapai tujuan. Misalnya dengan memberikan pelatihan, dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa, pertama, pemerian sesuatu yang baik yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa. Kedua, keistimewaan baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Ketiga, bijaksana yang tersendiri.

2. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah memberi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.

3. Peran pemerintah sebagai katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. Keterlibatan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak lagi secara alami.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berikut ini adalah kesimpulan Berdasarkan pembahasan dari permasalahan Di Atas mengenai peran pemerintah lokal dalam pemberdayaan petani cengkeh Di desa adean kabupaten banggai laut yaitu :

1. Pemerintah sudah menjalankan perannya dalam memperdayakan masyarakat tidak hanya petani cengkeh tetapi petani-petani lainnya dengan Program pembagian berbagai macam bibit pertanian salah satunya bibit cengkeh, serta mengadakan pembinaan, pelatihan serta penyuluhan kepada petani cengkeh agar dapat berinovasi, membuat regulasi, serta memberikan pelayanan dan juga memberdayakan masyarakat petani agar dapat merubah taraf hidup mereka.
2. Dalam pelaksanaan pemberdayaan petani di desa adean kabupaten banggai laut petani cengkeh di ajarkan cara membuat pupuk, Cara pemupukan, pengendalian hama dan penyakit. Namun dalam setiap pemberdayaan tidak lepas dari faktor yang membuat pemberdayaan berjalan dengan baik maupun berjalan dengan tidak baik. Berikut ini adalah faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan petani cengkeh di desa adean Adalah sebagai berikut :

- a) Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam pemberdayaan petani cengkeh adalah Hal-Hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya yang berperan penting dalam proses yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas ataupun motivasi dalam melakukan sesuatu secara aktif dalam pengelolaan dan keberhasilan suatu program di bidang pertanian di antaranya yaitu adanya bantuan yang dapat meringankan beban petani, serta adanya program pemberdayaan petani dan dukungan dari pemerintah daerah.

b) Faktor penghambat

Modal, pendidikan, penguasaan teknologi, hama dan cuaca yang tidak menentu. Modal yang sedikit membuat petani cengkeh belum bisa mengembangkan usaha tani nya, sehingga hasil ataupun produktivitas pertanian belum maksimal dan pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi petani dalam menerima informasi ataupun teknologi terbaru. Rendahnya pendidikan petani cengkeh membuat mereka tidak mampu mengantisipasi cuaca yang tidak menentu ataupun hama yang dapat menyerang usaha tani nya sehingga dapat mempengaruhi pendapatan rumah tangganya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai peran pemerintah lokal dalam pemberdayaan petani cengkeh di desa adean, maka dari itu penulis ingin memberikan saran yang mungkin bisa bermanfaat untuk pemerintah dalam rangka peningkatan dan pengembangan SDM khususnya di desa adean

kabupaten banggai laut. Saran yang saya ajukan dalam rangka Penyelesaian permasalahan tersebut untuk itu, pemerintah bisa lebih Terfokus untuk mengupayakan kesejahteraan petani cengkeh dengan cara membuat lagi berbagai strategi atau konsep pertanian secara Kukuh atau mantap karena semakin meningkatnya produktifitas dan kesejahteraan petani cengkeh maka perkembangan produksi cengkeh akan meningkat.

Adapun saran yang penulis sampaikan kepada pemerintah dan juga petani cengkeh adalah sebagai berikut :

a. Saran untuk pemerintah

Sebaiknya pembagian bibit cengkeh harus di sesuaikan dengan banyaknya petani cengkeh agar semua petani cengkeh bisa mendapatkan bibit cengkeh secara merata. Serta pemerintah bisa lebih fokus dalam mensejahterakan petani cengkeh karena semakin meningkatnya kesejahteraan petani cengkeh maka produktivitas pertanian cengkeh akan ikut Naik.

b. Saran Untuk Masyarakat petani cengkeh

Masyarakat adalah pihak yang di berdayakan, maka dari itu masyarakat petani Cengkeh harus lebih peka lagi jika ada informasi yang menyangkut pertanian khususnya tananman cengkeh, agar masyarakat petani tidak ketinggalan informasi jika ada penyuluhan atau apapun itu yang menyangkut dengan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, r. (2018). *system pemerintahan indonesia*. yogyakarta: CV budi utama.
- arwati, s. (2018). *pengantar ilmu pertanian berkelanjutan*. makassar: CV inti mediatama .
- Bahua, m. i. (2016). *kinerja penyuluh pertanian*. yogyakarta: budi utama.
- damanik, s. e. (2019). *pemberdayaan masyarakat desa*. sidoarjo: uais inspirasi Indonesia.
- domai, t. (2011). *desentralisasi paradigma baru dalam pemerintah lokal dan hubungan antar pemerintah daerah*. malang: elektronik pertama dan terbesar di indonesia .
- hamid, h. (2018). *manajemen pemberdayaan masyarakat*. Makassar: De la Mecca.
- handoko, s. y. (2020). *pemberdayaan masyarakat pertanian*. malang: UB press.
- harini, r. (2020). *tinjauan spasi optimis produksi pertanian pada wilayah perbatasan* . yogyakarta : gadja mada university press.
- harini, r. (2020). *tinjauan spasial optimasi produksi pertanian pada wilayah perbatasan*. yogyakarta : gadja mada university press.
- ilmar, a. (2014). *hukum tata pemerintahan* . jakarta: kencana.
- indarti, n. (2020). *pedoman pelatihan industri kecil menengah*. pasuruan: lembaga academic.
- maryani, d. r. (2019). *pemberdayaan masyarakat*. yogyakarta: CV budi utama.
- Muta'ali, l. (2019). *dinamika peran sektor pertanian dalam pembangunan wilayah di indonesia*. yogyakarta: gadjah mada university.
- nugroho, s. s. (2020). *hukum untuk petani perlindungan dan pemberdayaan petani dalam era globalisasi*. klaten: lakeisha.
- permana, a. y. (2015). *perang sipil spanyol 1963-1939 pergolakan ideologi dan intervensi asing*. bandung: kentja press.
- rahayu, T. p. (2019). *ensiklopedia profesi seri petani* . semarang: Alprin.
- Rahman, f. (2018). *teori pemerintahan*. malang: UB press.
- sari, s. d. (2020). *fungsi aset komunitas dalam pemberdayaan masyarakat muslim*. jakarta: tare books.
- sjamsir, z. (2017). *pembangunan pertanian dalam pusaran kearifan lokal*. makassar: Cv sah media.

suhardono, e. (1994). *teori peran konsep derivasi dan implikasinya*. jakarta: PT gamedia Pustaka Utama.

suharman. (2020). *tanaman potensial berkhasiat obat cengkeh, temulawak, jahe, kunyit, kencur, serai*. yogyakarta: CV budi Utama.

LAMPIRAN



YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA UTAMA
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Prodi S-1 : Ilmu Administrasi Niaga Terakreditasi B SK. No.1048/SK/BAN-PT/Akred/S/TV/2019
 Ilmu Administrasi Negara Terakreditasi A SK. No.1417/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017
 Prodi S-2 : Magister Ilmu Administrasi Terakreditasi B SK. No.33837SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017
 Jl. Semolowaru No. 84 Surabaya – 60118 Telp. & Fax. (031) 5944743 . Email : fia@unitomo.ac.id

Nomor : FIA. 157 /B. 2.04/1/2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Ijin Melakukan Penelitian**

Kepada Yth : Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banggai Laut.
 Alamat : Lampa, Banggai, Banggai Laut.
 Di - Sulawesi Tengah.

Dengan hormat,

Dalam rangka untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya, maka setiap mahasiswa wajib menyusun skripsi yang didukung oleh data penelitian, dengan adanya tersebut untuk melakukan penelitian maka dengan ini mohon di ijin kan mahasiswa kami :

Nama : **Wahyuna H. Haida**
 NIM : 2018020093
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Administrasi

Judul Penelitian : Peran Pemerintah Lokal Dalam Pemberdayaan Petani Cengkeh Di Desa Adean Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah.

Untuk dapatnya melaksanakan Penelitian di Kantor / Instansi yang Bapak / Ibu Pimpin.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 13 Januari 2022

 Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd
 NIDN : 0712115201



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 JL. JOGUGU ZAKARIA No. 5 Telp. (0462) 21175 BANGGAI 94891

Nomor	: 520/ 27 /Distanpang/II/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Dekan Fakultas Ilmu
Perihal	: Kesediaan Menerima	Administrasi Universitas
		DR. Soetomo
		Di -
		Surabaya

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas DR. Soetomo Nomor: FIA.157/B.2.04/1/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Perihal Izin Melakukan Penelitian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banggai Laut dan memperhatikan Surat Izin Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Laut An. **Wahyuna H. Maida** dengan ini disampaikan bahwa kami bersedia menerima mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banggai, 19 Januari 2022

An.KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 KABUPATEN BANGGAI LAUT
 SEKRETARIS

MOH. GAZALI A. UDA'A, SP
 NIP. 19750323 200212 1 007

Tembusan;

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Banggai Laut di Banggai
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai Laut di Banggai di Banggai
3. Saudari Wahyuna H.Maida

DOKUMENTASI





